



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022



DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2022-sekarang)

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (Tahun 1970 sampai sekarang)



R. HADI PURNOMO, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1970 - 1975)



SOEROTO, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1975 - 1982)



H. ROESLI, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1982 - 1988)



H. ZAKIR, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1988 - 1992)



SOELISTYOWATI SOEGONDO, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1992 - 1997)



H. PARMAN SOEPARMAN, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (1997 - 2000)



SOEJATNO, S.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2000 - 2005)



M. HATTA ALI, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2005 - 2007)



CICUT SUTIASO, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2008 - 2013)



DR. HERRI SWANTORO, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2014-2019)



DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 (2019-2022)

PROFIL PIMPINAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Drs. Wahyudin, M.Si

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.H

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum



Zahlisa Vitalita, S.H., M.H

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Dipimpin Oleh:

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

1

Dibantu Oleh:

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum

2

DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan
Umum

3

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan
Umum

4

VISI

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung"

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum.

Kata Pengantar



Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya meningkatkan layanan peradilan umum dengan melakukan diskusi terbuka baik melalui *teleconference* (sapa pengadilan), maupun berupa kunjungan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi di pengadilan. Upaya tersebut dilakukan untuk dapat mencari solusi bersama dalam menyusun strategi perbaikan atau *transfer knowledge*. Hal tersebut selaras dengan pembinaan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada acara Rapat Koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 11 Desember 2022. Dengan mengusung semangat Abhinaya Upangga Wisesa, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus melakukan langkah-langkah perbaikan layanan peradilan dalam mewujudkan perolehan predikat Wilayah Bebas Birokrasi Melayani. Mahkamah Agung ibarat satu pohon besar yang batang dan cabangnya adalah pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia, batang dan cabang diharapkan dapat tumbuh subur dan berbunga sehingga wibawa dan keharuman pohon besar tersebut dapat dirasakan oleh penikmatnya.

Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, semoga kerja keras kita dapat membawa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam mewujudkan peradilan yang modern sebagai harapan kita bersama.

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Selamat Atas Pelantikan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Semoga Sukses dan
Amanah



H. Bambang Myanto, S.H., M.H

Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selamat Atas Pelantikan

Eselon III dan IV

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

**Semoga Sukses dan
Amanah**



Keluarga Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

DAFTAR ISI

Profil Pimpinan.....	ii
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KEADAAN PERKARA.....	2
A. Data Pengadilan.....	2
1. Jumlah Pengadilan Negeri.....	2
2. Klasifikasi Pengadilan Tinggi.....	3
3. Jumlah Pengadilan Khusus.....	3
B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan.....	3
1. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi.....	3
2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi.....	25
C. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan.....	26
1. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri.....	26
2. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi.....	31
D. Layanan Hukum.....	33
1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum).....	33
2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan.....	34
3. Pembebasan Biaya Perkara.....	35
4. Restorative Justice.....	36
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).....	38

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial.....	38
a. Jumlah Hakim Seluruh Indonesia.....	38
b. Promosi dan Mutasi Hakim.....	40
c. Hukuman Disiplin Hakim.....	41
d. Pensiun, Pemberhentian dan Meninggal Dunia Hakim.....	41
e. Pendidikan dan Pelatihan Hakim.....	42
f. Jumlah Panitera dan Jurusita Seluruh Indonesia.....	42
g. Promosi, Mutasi Panitera dan Jurusita.....	43
h. Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita.....	43
i. Pensiun, Meninggal Panitera dan Jurusita.....	44
B. Sumber Daya Manusia Non Yustisial.....	44
1. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.....	44
2. Pelatihan, Diklat dan Asessment.....	46
3. Rekrutmen, Latsar dan Piagam.....	46
4. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar.....	47
5. Kenaikan Pangkat.....	47
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA.....	48
A. Pengelolaan Keuangan.....	48
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	50
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	60
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	63
A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	63
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	64
C. Inovasi Pelayan Publik.....	66
D. Data dan Informasi.....	67

BAB VI PEMBINAAN	68
A. Peresmian Gedung Pengadilan	68
B. Peluncuran Aplikasi.....	69
C. Kerjasama dengan Daskrimti Kejaksaan	70
D. Kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat.....	70
E. Audiensi dengan Jepang.....	71
F. Bimbingan Teknis	73
BAB VII PENGAWASAN	75
A. INTERNAL	75
B. EVALUASI	76
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. REKOMENDASI.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pengadilan	2
Tabel 2. 2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi.....	3
Tabel 2. 3 Jumlah Pengadilan Khusus.....	3
Tabel 2. 4. Jumlah Perkara Gugatan	4
Tabel 2. 5. Jumlah Perkara Permohonan.....	6
Tabel 2. 6 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana	7
Tabel 2. 7. Jumlah Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan	8
Tabel 2. 8. Jumlah Perkara Mediasi.....	9
Tabel 2. 9. Jumlah Perkara Perkara Niaga	10
Tabel 2. 10 Jumlah Perkara Hubungan Industri (PHI)	11
Tabel 2. 11. Jumlah Perkara Pidana Biasa	12
Tabel 2. 12. Jumlah Perkara Pidana Singkat	13
Tabel 2. 13. Jumlah Perkara Pidana Cepat.....	14
Tabel 2. 14. Jumlah Perkara Lalu Lintas	15
Tabel 2. 15. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).....	17
Tabel 2. 16. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak	18
Tabel 2. 17. Jumlah Perkara Pidana Khusus Perikanan.....	19
Tabel 2. 18. Jumlah Perkara Pidana Praperadilan	19
Tabel 2. 19. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Biasa	20
Tabel 2. 20. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	21
Tabel 2. 21. Pelaku Tindak Pidana Anak	22
Tabel 2. 22. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi.....	23
Tabel 2. 23. Statistik E-Court.....	24
Tabel 2. 24 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tinggi.....	25
Tabel 2. 25 Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tinggi	25
Tabel 2. 26. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan.....	26
Tabel 2. 27. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Permohonan.....	26
Tabel 2. 28. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.....	26
Tabel 2. 29. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perlawanan/Bantahan.....	27

Tabel 2. 30. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Kepailitan	27
Tabel 2. 31. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara PKPU	27
Tabel 2. 32. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara HAKI	28
Tabel 2. 33. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara PHI	28
Tabel 2. 34. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana	28
Tabel 2. 35. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa	29
Tabel 2. 36. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.....	29
Tabel 2. 37. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Cepat.....	29
Tabel 2. 38. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak	30
Tabel 2. 39. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (KORUPSI)	30
Tabel 2. 40. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perikanan	30
Tabel 2. 41. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Praperadilan	30
Tabel 2. 42. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan.....	31
Tabel 2. 43. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perlawanan/Bantahan.....	31
Tabel 2. 44. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa	31
Tabel 2. 45. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Singkat.....	31
Tabel 2. 46. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Cepat.....	32
Tabel 2. 47. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)	32
Tabel 2. 48. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perikanan	32
Tabel 2. 49. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak	32
Tabel 2. 50. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	33
Tabel 2. 51. Sidang Diluar Gedung Pengadilan	35
Tabel 2. 52. Jumlah Pembebasan Biaya Perkara.....	36
Tabel 2. 53. Jumlah Perkara Restorative Justice	37
Tabel 3. 1. Data Jumlah Hakim Pergender	38
Tabel 3. 3. Kenaikan Pangkat Hakim	39
Tabel 3. 4. Jumlah Hakim Karir.....	39
Tabel 3. 5. Jumlah Hakim Ad Hoc.....	39
Tabel 3. 6. Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri	40
Tabel 3. 7. Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi.....	40
Tabel 3. 8. Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc	41

Tabel 3. 9. Jumlah Hukuman Disiplin Hakim	41
Tabel 3. 10. Jumlah Pensiun, Pemberhentian dan Meninggal Dunia Hakim	41
Tabel 3. 11. Pendidikan dan Pelatihan Hakim	42
Tabel 3. 12. Jumlah Panitera dan Jurusita Per Pengadilan Tinggi dan Kelas Pengadilan Negeri	42
Tabel 3. 13. Kenaikan Pangkat Panitera dan Jurusita	43
Tabel 3. 14. Promosi, Mutasi Panitera dan Jurusita	43
Tabel 3. 15. Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita	43
Tabel 3. 16. Pensiun, Meninggal Panitera dan Jurusita	44
Tabel 3. 17. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	45
Tabel 3. 18. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	45
Tabel 3. 19. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Gender	46
Tabel 3. 20. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar	47
Tabel 3. 21. Kenaikan Pangkat	47
Tabel 4. 1. Pagu Anggaran Tahun 2022	48
Tabel 4. 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022	49
Tabel 4. 3. Tanah	52
Tabel 4. 4. Gedung dan Bangunan	52
Tabel 4. 5. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	53
Tabel 4. 6. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	54
Tabel 4. 7. Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam	54
Tabel 4. 8. Peralatan dan Mesin	55
Tabel 4. 9. Tranfer Keluar Aset/Barang BMN	55
Tabel 4. 10. Pengaduan Sarana dan Prasarana Belanja Moda	56
Tabel 4. 11. Pembangunan/Rehabilitas Gedung dan Bangunan	56
Tabel 4. 12. Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang)	57
Tabel 4. 13. Surat Masuk	58
Tabel 4. 14. Surat Keluar	59
Tabel 4. 15. Penomoran Surat	59
Tabel 5. 1. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	64
Tabel 6. 1 Kegiatan Bimtek Tenaga Teknis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6. 1 Peresmian Gedung Pengadilan	68
Gambar 6. 2. Peresmian Aplikasi Badilum	69
Gambar 6. 3. Kerjasama dengan Daskrimti Kejaksaan	70
Gambar 6. 4. Kerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat.....	71
Gambar 6. 5. Audiensi dengan Jepang.....	72
Gambar 6. 6. Bimtek Tenaga Teknis	73

BAB I PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan pelayanan peradilan setiap tahunnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan pengembangan layanan peradilan serta monitoring evaluasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan meluncurkan aplikasi seperti berikut:

1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS PT), aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Pengadilan Tinggi untuk melihat tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP dan kesiapan Pengadilan Tinggi dalam mengimplementasikan register elektronik, dan juga bisa di gunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi bagi pimpinan pengadilan;
2. Monitoring Implementasi SIPP (MIS PT), aplikasi yang menyediakan informasi data SIPP pada Tingkat Banding yang belum di isi secara lengkap dan dapat di gunakan sebagai alat memonitoring dan evaluasi terhadap aplikasi SIPP oleh Mahkamah Agung terutama bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pengadilan tinggi ;
3. Aplikasi capaian Kinerja Tenaga Teknis (CAKRA), aplikasi yang merekam capaian kinerja penanganan perkara antara lain pelaksanaan mediasi, pelaksanaan perkara, pelaksanaan litigasi dan indikator lainnya bagi seluruh tenaga teknis di lingkungan peradilan umum;
4. Aplikasi Badilum Information system (BIS), merupakan aplikasi berbasis Web yang digunakan proses kepegawaian dan pengolahan data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang inovatis, efektif dan akurat. Proses kepegawaian meliputi proses promosi dan mutasi pegawai seperti data dukung, proses kenaikan pangkat, data dukung proses pensiun dan pencetakan surat – surat keputusan.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. Data Pengadilan

1. Jumlah Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri di seluruh Indonesia berjumlah 382 (tiga ratus delapan puluh dua) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) wilayah Hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana berikut:

NO	Pengadilan Tinggi	Tipe	Pengadilan Negeri				Jumlah
			Klas IA Khusus	Klas IA	Klas IB	Klas II	
1	Banda Aceh	B	0	1	3	18	22
2	Medan	A	1	1	11	7	20
3	Padang	A	0	1	2	13	16
4	Riau	B	0	2	4	5	11
5	Kepulauan Riau	B	0	2	0	2	4
6	Jambi	B	0	1	1	8	10
7	Palembang	A	1	1	4	4	10
8	Bengkulu	B	0	1	1	7	9
9	Tanjung Karang	A	0	1	3	7	11
10	Bangka Belitung	B	0	1	1	3	5
11	DKI-Jakarta	A	5	0	0	0	5
12	Bandung	A	2	6	10	5	23
13	Jawa Tengah	A	2	6	24	3	35
14	Yogyakarta	B	0	2	2	1	5
15	Surabaya	A	2	8	14	11	35
16	Banten	B	1	1	0	2	4
17	Denpasar	A	0	1	3	4	8
18	Nusa Tenggara Barat	B	0	1	3	2	6
19	Kupang	B	0	1	1	14	16
20	Pontianak	B	0	1	2	7	10
21	Palangkaraya	B	0	1	2	8	11
22	Banjarmasin	A		1	4	8	13
23	Kalimantan Timur	B	0	2	3	4	9
24	Kalimantan Utara	B	0	0	2	2	4
25	Manado	B	0	1	3	4	8
26	Sulawesi Tengah	B	0	1	1	5	7
27	Makassar	A	1	2	5	14	22
28	Sulawesi Barat	B	0	1	0	3	4
29	Sulawesi Tenggara	B	0	1	2	6	9
30	Gorontalo	B	0	1	1	3	5
31	Ambon	B	0	1	0	7	8
32	Maluku Utara	B	0	1	0	5	6
33	Jayapura	B	0	1	0	6	7
34	Papua Barat	B	0	0	2	2	4
Total			15	53	114	200	382

Tabel 2. 1 Jumlah Pengadilan

2. Klasifikasi Pengadilan Tinggi

1	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi A	:	11	Pengadilan
2	Pengadilan Tingkat Banding Klasifikasi B	:	23	Pengadilan

Tabel 2. 2 Klasifikasi Pengadilan Tinggi

3. Jumlah Pengadilan Khusus

1	A Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Banding (Tipikor)	:	34	Pengadilan
	B Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tk. Pertama (Tipikor)	:	33	Pengadilan
2	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	:	34	Pengadilan
3	Pengadilan Niaga	:	5	Pengadilan
4	Pengadilan Perikanan	:	10	Pengadilan

Tabel 2. 3 Jumlah Pengadilan Khusus

B. Keadaan Perkara Pada Pengadilan

1. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

1.1. Jumlah Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Rekapitulasi Perkara Gugatan

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	12,925	Perkara
-	Perkara Masuk	:	39,335	Perkara
-	Beban	:	52,260	Perkara
-	Perkara Putus 2022	:	37,550	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	12,238	Perkara

Berdasarkan data diatas jumlah perkara gugatan yang masuk sebanyak 39.335 perkara dimana sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 12.925 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2022 sebesar 52.260 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 37.550 perkara, sehingga persentase penyelesaian perkara pada tahun 2022 sebesar 71 %.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 70 % sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara meningkat sebesar 1%.

Jumlah Perkara Gugatan

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	88	308	396	29	266	101	112	91	13
2	Medan	934	2,764	3,698	139	2,664	895	655	400	108
3	Padang	313	780	1,093	85	640	368	284	159	36
4	Riau	310	1,412	1,722	114	1,315	293	235	182	53
5	Jambi	160	488	648	53	454	141	156	100	19
6	Palembang	222	589	811	40	560	211	147	98	28
7	Bengkulu	55	145	200	7	137	56	36	22	7
8	Tanjung Karang	213	556	769	34	564	171	109	67	22
9	Bangka Belitung	40	203	243	6	201	36	23	15	5
10	Jakarta	2,246	4,707	6,953	353	4,537	2,063	1,009	418	137
11	Bandung	1,361	3,578	4,939	220	3,445	1,274	764	436	150
12	Jawa Tengah	923	2,919	3,842	254	2,729	859	486	332	54
13	Yogyakarta	225	655	880	45	655	180	113	67	21
14	Surabaya	1,468	4,192	5,660	394	3,926	1,340	791	511	150
15	Banten	769	1,595	2,364	47	1,552	765	265	147	42
16	Denpasar	465	3,497	3,962	123	3,312	527	237	165	53
17	Nusa Tenggara Barat	213	672	885	68	588	229	221	130	63
18	Kupang	248	898	1,146	50	854	242	209	140	35
19	Pontianak	147	759	906	57	689	160	100	71	13
20	Palangkaraya	140	584	724	23	553	148	109	72	14
21	Banjarmasin	108	569	677	24	535	118	88	58	15
22	Kalimantan Timur	356	1,101	1,457	71	1,084	302	219	144	40
23	Manado	495	2,186	2,681	25	2,248	408	202	109	34
24	Sulawesi Tengah	153	567	720	46	521	153	92	51	14
25	Makassar	607	1,547	2,154	81	1,499	574	437	283	129
26	Sulawesi Tenggara	107	362	469	27	320	122	124	69	21
27	Gorontalo	50	179	229	12	164	53	56	31	4
28	Ambon	123	460	583	13	450	120	73	60	17
29	Maluku Utara	71	242	313	11	250	52	43	18	5
30	Jayapura	315	821	1,136	21	838	277	97	53	18
Total		12,925	39,335	52,260	2,472	37,550	12,238	7,492	4,499	1,320

Tabel 2. 4. Jumlah Perkara Gugatan

b. Rekapitulasi Perkara Permohonan

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	477	Perkara
-	Perkara Masuk	:	59,800	Perkara
-	Beban	:	60,277	Perkara
-	Perkara Putus 2022	:	58,192	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	461	Perkara

Jumlah perkara permohonan yang masuk tahun 2022 yang masuk sebanyak 59.800 perkara, dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 477 sehingga beban perkara pada tahun 2022 sebanyak 60.277 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 58.217 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 96 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 94 % sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara meningkat sebesar 2%.

Jumlah Perkara Permohonan

NO	Pengadilan Tinggi	Permohonan								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	10	1,585	1,595	11	1,580	4	0	1	0
2	Medan	17	3,742	3,759	94	3,649	16	0	1	0
3	Padang	9	873	882	23	841	18	0	0	0
4	Riau	21	1,941	1,962	43	1,902	17	0	3	0
5	Jambi	16	557	573	15	540	18	0	1	0
6	Palembang	17	909	926	18	895	13	0	0	0
7	Bengkulu	8	396	404	5	397	2	0	0	0
8	Tanjung Karang	10	982	992	22	961	9	0	1	0
9	Bangka Belitung	9	324	333	0	326	7	0	1	0
10	Jakarta	46	5,026	5,072	238	4,745	89	0	10	0
11	Bandung	45	6,621	6,666	158	6,492	16	0	7	0
12	Jawa Tengah	39	5,359	5,398	167	5,209	22	0	6	0
13	Yogyakarta	32	1,901	1,933	64	1,834	35	0	1	0
14	Surabaya	20	10,001	10,021	398	9,603	20	0	5	0
15	Banten	13	1,771	1,784	8	1,735	41	0	1	0
16	Denpasar	33	1,978	2,011	81	1,915	15	0	3	0
17	Nusa Tenggara Barat	18	1,424	1,442	79	1,344	19	0	1	0
18	Kupang	14	1,017	1,031	16	992	23	0	2	0
19	Pontianak	16	2,372	2,388	59	2,328	1	0	1	0
20	Palangkaraya	4	648	652	4	648	0	0	0	0
21	Banjarmasin	2	870	872	3	869	0	0	1	0
22	Kalimantan Timur	12	1,441	1,453	30	1,408	15	0	0	0
23	Manado	10	1,862	1,872	18	1,852	2	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	8	273	281	7	269	5	0	0	0
25	Makassar	20	2,384	2,404	24	2,358	22	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	14	389	403	7	382	14	0	0	0
27	Gorontalo	3	175	178	1	173	4	0	0	0
28	Ambon	3	315	318	4	312	2	0	0	0
29	Maluku Utara	2	211	213	1	207	5	0	0	0
30	Jayapura	6	2,453	2,459	26	2,426	7	0	1	0
Total		477	59,800	60,277	1,624	58,192	461	0	47	0

Tabel 2. 5. Jumlah Perkara Permohonan

c. Jumlah Perkara Gugatan Sederhana

NO	Pengadilan Tinggi	Gugatan Sederhana						
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan
1	Banda Aceh	1	22	23	3	20	0	0
2	Medan	10	155	165	8	142	15	0
3	Padang	13	219	232	14	191	27	0
4	Riau	25	222	247	13	223	11	0
5	Jambi	35	225	260	10	230	20	0
6	Palembang	80	605	685	38	582	65	0
7	Bengkulu	6	34	40	2	35	3	0
8	Tanjung Karang	7	94	101	3	91	7	0
9	Bangka Belitung	2	63	65	3	61	1	0
10	Jakarta	30	154	184	11	155	18	0
11	Bandung	69	695	764	53	668	43	0
12	Jawa Tengah	63	1,237	1,300	116	1,131	53	0
13	Yogyakarta	9	141	150	12	130	8	0
14	Surabaya	73	1,253	1,326	140	1,130	56	0
15	Banten	27	128	155	5	113	37	0
16	Denpasar	5	67	72	7	60	5	0
17	Nusa Tenggara Barat	7	174	181	25	149	7	0
18	Kupang	5	110	115	3	108	4	0
19	Pontianak	9	63	72	9	61	2	0
20	Palangkaraya	0	44	44	0	39	5	0
21	Banjarmasin	6	122	128	0	124	4	0
22	Kalimatan Timur	3	77	80	3	73	4	0
23	Manado	33	341	374	6	359	9	0
24	Sulawesi Tengah	15	124	139	6	123	10	0
25	Makassar	12	184	196	12	162	22	0
26	Sulawesi Tenggara	3	51	54	4	47	3	0
27	Gorontalo	5	48	53	5	48	0	0
28	Ambon	0	8	8	0	8	0	0
29	Maluku Utara	0	50	50	3	46	1	0
30	Jayapura	4	165	169	2	152	15	0
Total		557	6,875	7,432	516	6,461	455	0

Tabel 2. 6 Jumlah Perkara Gugatan Sederhana

d. Jumlah Perkara Perdata Gugatan Perlawanan/Bantahan

NO	Pengadilan Tinggi	Perlawanan/Bantahan									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	2	24	26	3	13	10	0	10	5	0
2	Medan	24	59	83	6	45	32	0	22	11	5
3	Padang	13	25	38	3	21	14	0	11	6	0
4	Riau	9	44	53	3	31	19	0	22	14	3
5	Jambi	5	11	16	1	14	1	0	9	7	0
6	Palembang	6	19	25	0	16	9	0	8	5	2
7	Bengkulu	1	7	8	0	1	7	0	0	0	1
8	Tanjung Karang	5	21	26	0	18	8	0	8	2	3
9	Bangka Belitung	2	3	5	1	3	1	0	3	0	0
10	Jakarta	59	92	151	10	91	50	0	38	9	2
11	Bandung	66	110	176	9	114	53	0	54	37	3
12	Jawa Tengah	33	118	151	20	91	40	0	45	29	2
13	Yogyakarta	9	17	26	3	14	9	0	3	1	0
14	Surabaya	49	176	225	25	130	70	0	51	34	11
15	Banten	17	29	46	0	28	18	0	8	2	0
16	Denpasar	14	50	64	10	33	21	0	16	10	2
17	Nusa Tenggara Barat	17	41	58	5	40	13	0	24	9	1
18	Kupang	8	20	28	4	15	9	0	4	4	0
19	Pontianak	2	3	5	0	2	3	0	2	2	0
20	Palangkaraya	3	6	9	0	6	3	0	6	2	1
21	Banjarmasin	3	5	8	1	7	0	0	6	5	2
22	Kalimantan Timur	4	19	23	0	19	4	0	8	4	3
23	Manado	6	22	28	1	18	9	0	10	6	1
24	Sulawesi Tengah	2	13	15	0	8	7	0	4	1	0
25	Makassar	16	99	115	5	77	33	0	40	19	4
26	Sulawesi Tenggara	2	12	14	0	9	5	0	7	3	1
27	Gorontalo	1	3	4	0	3	1	0	1	0	0
28	Ambon	2	5	7	1	5	1	0	1	1	0
29	Maluku Utara	2	20	22	3	19	0	0	2	0	0
30	Jayapura	2	17	19	0	14	5	0	3	2	0
Total		384	1,090	1,474	114	905	455	0	426	230	47

Tabel 2. 7. Jumlah Perkara Gugatan Perlawanan/Bantahan

e. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi

NO	Pengadilan Tinggi	Mediasi				
		Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Banda Aceh	319	20	219	67	13
2	Medan	2,830	43	1,216	1,464	107
3	Padang	812	29	500	236	47
4	Riau	1,473	68	581	774	50
5	Jambi	500	16	295	173	16
6	Palembang	598	20	326	233	19
7	Bengkulu	154	4	93	52	5
8	Tanjung Karang	605	27	285	265	28
9	Bangka Belitung	206	7	79	117	3
10	Jakarta	4,782	114	1,925	2,541	202
11	Bandung	3,698	149	1,695	1,712	142
12	Jawa Tengah	3,055	167	1,268	1,519	101
13	Yogyakarta	674	23	292	342	17
14	Surabaya	4,412	223	2,019	2,002	168
15	Banten	1,628	71	677	830	50
16	Denpasar	3,555	66	910	2,519	60
17	Nusa Tenggara Barat	714	18	459	223	14
18	Kupang	921	22	462	407	30
19	Pontianak	760	20	224	496	20
20	Palangkaraya	590	22	247	308	13
21	Banjarmasin	577	31	181	358	7
22	Kalimantan Timur	1,130	43	418	637	32
23	Manado	2,211	21	580	1,583	27
24	Sulawesi Tengah	581	24	227	308	22
25	Makassar	1,657	48	823	735	51
26	Sulawesi Tenggara	375	9	242	109	15
27	Gorontalo	182	13	119	46	4
28	Ambon	468	11	198	251	8
29	Maluku Utara	244	3	111	126	4
30	Jayapura	840	30	314	484	12
Total		40,551	1,362	16,985	20,917	1,287

Tabel 2. 8. Jumlah Perkara Mediasi

1.2. Jumlah Perkara Perdata Khusus pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Jumlah Perkara Niaga

- Perkara Pailit

NO	Pengadilan Tinggi	Pailit									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	0	4	4	1	3	0	0	0	0	0
2	Jakarta	10	54	64	7	55	2	0	0	7	0
3	Jawa Tengah	12	22	34	1	25	8	0	0	2	0
4	Surabaya	1	21	22	4	16	2	0	0	2	0
5	Makasar	5	4	9	0	5	4	0	0	1	0
Total		28	105	133	13	104	16	0	0	12	0

- Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

NO	Pengadilan Tinggi	PKPU									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Banding	Kasasi	PK
1	Medan	6	64	70	11	53	6	0	0	3	0
2	Jakarta	62	563	625	79	474	72	0	0	76	7
3	Jawa Tengah	6	55	61	3	51	7	0	0	7	2
4	Surabaya	19	125	144	15	106	23	0	0	22	4
5	Makasar	4	16	20	0	16	4	0	0	3	1
Total		97	823	920	108	700	112	0	0	111	14

- Perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

NO	Pengadilan Tinggi	Jenis Perkara	HAKI							
			Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Kasasi	PK
1	Medan	Hak Cipta	0	0	0	0	0	0	0	0
		Merk	1	7	8	0	7	1	3	0
2	Jakarta	Hak Cipta	5	8	13	0	9	4	3	1
		Merk	33	87	120	4	113	3	32	6
		Paten	5	5	10	0	5	5	4	0
3	Jawa Tengah	Hak Cipta	1	2	3	0	3	0	2	1
		Merk	2	2	4	0	3	1	3	1
		Paten	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Surabaya	Hak Cipta	1	2	3	0	2	1	2	0
		Merk	3	6	9	2	5	2	4	3
		Paten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Makasar	Hak Cipta	0	1	1	0	0	1	0	0
		Merk	0	2	2	0	2	0	1	1
Total			51	122	173	6	149	18	54	13

Tabel 2. 9. Jumlah Perkara Perkara Niaga

b. Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)

NO	Pengadilan Tinggi	PHI								
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Keberatan	Kasasi	PK
1	Banda Aceh	3	7	10	0	7	3	0	0	7
2	Medan	140	365	505	8	389	108	0	0	223
3	Padang	8	32	40	5	26	9	0	0	10
4	Riau	77	140	217	2	146	69	0	0	98
5	Jambi	15	30	45	0	24	21	0	0	15
6	Palembang	5	200	205	12	182	11	0	0	73
7	Bengkulu	6	6	12	0	5	7	0	0	4
8	Tanjung Karang	6	29	35	0	23	12	0	0	18
9	Bangka Belitung	77	438	515	24	441	50	0	0	212
10	Jakarta	69	235	304	4	249	51	0	0	123
11	Bandung	22	48	70	4	57	9	0	0	24
12	Jawa Tengah	2	39	41	3	36	2	0	0	32
13	Yogyakarta	74	218	292	0	239	53	0	0	118
14	Surabaya	4	40	44	2	38	4	0	0	17
15	Banten	2	20	22	0	14	8	0	0	8
16	Denpasar	18	35	53	1	41	11	0	0	27
17	Nusa Tenggara Barat	48	63	111	0	77	34	0	0	40
18	Kupang	28	42	70	1	37	32	0	0	20
19	Pontianak	2	11	13	0	9	4	0	0	8
20	Palangkaraya	8	11	19	0	16	3	0	0	11
21	Banjarmasin	3	30	33	0	29	4	0	0	11
22	Kalimantan Timur	5	21	26	0	19	7	0	0	11
23	Manado	5	21	26	2	20	4	0	0	8
24	Sulawesi Tengah	2	20	22	0	19	3	0	0	16
25	Makassar	0	30	30	0	30	0	0	0	26
26	Sulawesi Tenggara	21	45	66	0	49	17	0	0	22
27	Gorontalo	11	12	23	0	12	11	0	0	9
28	Ambon	63	158	221	1	167	53	0	0	72
29	Maluku Utara	10	18	28	2	21	5	0	0	8
30	Jayapura	6	44	50	4	44	2	0	0	25
Total		740	2,408	3,148	75	2,466	607	0	0	1,296

Tabel 2. 10 Jumlah Perkara Hubungan Industri (PHI)

1.3. Jumlah Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Jumlah Perkara Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Biasa									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	552	3,230	3,782	0	3,205	577	501	276	22	0
2	Medan	3,076	12,595	15,671	0	12,725	2,946	1,878	1,289	95	0
3	Padang	451	3,222	3,673	0	3,044	629	308	160	24	0
4	Riau	906	7,231	8,137	0	7,075	1,062	761	456	210	0
5	Jambi	141	2,308	2,449	0	2,345	104	231	127	10	0
6	Palembang	979	6,247	7,226	0	6,427	799	279	151	29	0
7	Bengkulu	177	1,520	1,697	0	1,464	233	170	78	6	0
8	Tanjung Karang	486	4,423	4,909	0	4,326	583	269	156	20	0
9	Bangka Belitung	88	1,189	1,277	0	1,177	100	84	40	214	0
10	Jakarta	1,653	5,221	6,874	0	5,314	1,560	328	289	85	0
11	Bandung	1,609	9,316	10,925	0	9,375	1,550	448	288	35	0
12	Jawa Tengah	951	6,836	7,787	0	6,853	934	673	493	29	0
13	Yogyakarta	233	1,644	1,877	0	1,605	272	138	64	10	0
14	Surabaya	2,253	14,789	17,042	0	14,425	2,617	1,516	1,044	150	0
15	Banten	1,226	3,770	4,996	0	3,640	1,356	139	104	10	0
16	Denpasar	369	1,914	2,283	0	1,921	362	93	50	46	0
17	Nusa Tenggara Barat	222	1,995	2,217	0	1,954	263	150	83	9	0
18	Kupang	179	1,599	1,778	0	1,619	159	197	96	9	0
19	Pontianak	559	3,503	4,062	0	3,456	606	315	197	24	0
20	Palangkaraya	219	2,262	2,481	0	2,180	301	222	143	7	0
21	Banjarmasin	299	3,967	4,266	0	3,979	287	346	215	11	0
22	Kalimantan Timur	651	4,622	5,273	0	4,446	827	277	155	19	0
23	Manado	325	1,755	2,080	0	1,734	346	132	62	1	0
24	Sulawesi Tengah	293	1,901	2,194	0	1,895	299	198	100	8	0
25	Makassar	1,177	6,162	7,339	0	6,224	1,115	967	677	16	0
26	Sulawesi Tenggara	64	1,764	1,828	0	1,707	121	215	119	11	0
27	Gorontalo	74	541	615	0	502	113	83	51	1	0
28	Ambon	202	890	1,092	0	859	233	158	82	0	0
29	Maluku Utara	103	553	656	0	531	125	60	27	0	0
30	Jayapura	560	2,140	2,700	0	2,040	660	142	66	6	0
Total		20,077	119,109	139,186	0	118,047	21,139	11,278	7,138	1,117	0

Tabel 2. 11. Jumlah Perkara Pidana Biasa

Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	20,077	Perkara
-	Perkara Masuk	:	119,109	Perkara
-	Beban	:	139,186	Perkara
-	Perkara Putus 2022	:	118,047	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	21,139	Perkara

b. Jumlah Perkara Pidana Singkat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Singkat									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	1	2	3	0	2	1	0	0	0	0
2	Medan	0	13	13	0	13	0	2	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Palembang	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bandung	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0
12	Jawa Tengah	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
13	Yogyakarta	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0
14	Surabaya	4	9	13	0	10	3	0	0	0	0
15	Banlen	6	1	7	0	4	3	0	0	0	0
16	Denpasar	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0
17	Nusa Tenggara Barat	1	10	11	0	10	1	0	0	0	0
18	Kupang	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0
19	Pontianak	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
20	Palangkaraya	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Timur	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0
23	Manado	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Makassar	7	0	7	0	0	7	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ambon	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
29	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		25	100	125	0	105	20	2	0	0	0

Tabel 2. 12. Jumlah Perkara Pidana Singkat

Rekapitulasi Perkara Pidana Singkat

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	25	Perkara
-	Perkara Masuk	:	100	Perkara
-	Beban	:	125	Perkara
-	Perkara Putus 2022	:	105	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	20	Perkara

c. Jumlah Perkara Pidana Cepat

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Cepat									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	1	284	285	0	284	1	0	0	0	0
2	Medan	12	1,428	1,440	0	1,427	13	10	1	0	0
3	Padang	2	245	247	0	245	2	2	0	0	0
4	Riau	3	548	551	0	548	3	3	1	0	0
5	Jambi	8	148	156	0	148	8	0	0	0	0
6	Palembang	1	144	145	0	144	1	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	48	49	0	48	1	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	1	63	64	0	62	2	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	1	18	19	0	18	1	1	0	0	0
10	Jakarta	8	2,373	2,381	0	2,373	8	0	0	0	0
11	Bandung	1	863	864	0	863	1	4	0	0	0
12	Jawa Tengah	15	559	574	0	559	15	0	0	0	0
13	Yogyakarta	2	303	305	0	303	2	0	0	0	0
14	Surabaya	13	7,443	7,456	0	7,443	13	1	0	0	0
15	Banten	1	18	19	0	18	1	0	0	0	0
16	Denpasar	1	55	56	0	55	1	0	0	0	0
17	Nusa Tenggara Barat	2	346	348	0	347	1	5	1	0	0
18	Kupang	1	37	38	0	37	1	0	0	0	0
19	Pontianak	1	203	204	0	203	1	0	0	0	0
20	Palangkaraya	1	103	104	0	103	1	0	0	0	0
21	Banjarmasin	13	346	359	0	346	13	0	0	0	0
22	Kalimantan Timur	6	325	331	0	325	6	1	0	0	0
23	Manado	4	65	69	0	65	4	0	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	3	21	24	0	21	3	0	0	0	0
25	Makassar	2	153	155	0	153	2	5	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	1	40	41	0	40	1	0	0	0	0
27	Gorontalo	1	16	17	0	16	1	0	0	0	0
28	Ambon	1	88	89	0	88	1	0	0	0	0
29	Maluku Utara	1	36	37	0	36	1	0	0	0	0
30	Jayapura	7	35	42	0	35	7	0	0	0	0
Total		115	16,354	16,469	0	16,353	116	32	3	0	0

Tabel 2. 13. Jumlah Perkara Pidana Cepat

Rekapitulasi Perkara Pidana Cepat

- Sisa Perkara Tahun 2021	:	115	Perkara
- Perkara Masuk	:	16,354	Perkara
- Beban	:	16,469	Perkara
- Perkara Putus 2022	:	16,353	Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2022	:	116	Perkara

d. Jumlah Perkara Lalu Lintas

No	Pengadilan Tinggi	Jumlah Perkara Lalulintas	Denda
1	Banda Aceh	30,465	2,065,377,902
2	Medan	40,323	3,486,433,500
3	Padang	57,206	5,645,618,240
4	Riau	90,412	8,443,829,975
5	Jambi	21,761	2,802,802,806
6	Palembang	89,734	9,058,101,129
7	Bengkulu	15,633	1,481,445,272
8	Tanjung Karang	35,495	2,807,481,700
9	Bangka Belitung	27,898	2,312,917,935
10	Jakarta	537,358	69,022,936,281
11	Bandung	379,023	27,259,371,921
12	Jawa Tengah	459,951	32,249,393,551
13	Yogyakarta	47,890	3,758,155,003
14	Surabaya	333,316	28,884,954,701
15	Banten	95,862	8,360,770,700
16	Denpasar	35,761	1,936,579,124
17	Nusa Tenggara Barat	59,817	6,018,977,788
18	Kupang	9,331	909,143,055
19	Pontianak	9,018	1,754,584,000
20	Palangkaraya	20,117	2,971,701,900
21	Banjarmasin	34,701	3,796,953,239
22	Kalimantan Timur	17,784	2,653,237,966
23	Manado	17,100	1,551,121,491
24	Sulawesi Tengah	17,084	1,366,891,616
25	Makassar	39,089	4,298,722,007
26	Sulawesi Tenggara	19,277	1,973,636,130
27	Gorontalo	8,346	910,936,200
28	Ambon	7,673	942,324,563
29	Maluku Utara	20,740	1,728,421,000
30	Jayapura	12,738	2,033,610,888
Total		2,590,903	242,486,431,583

Tabel 2. 14. Jumlah Perkara Lalu Lintas

Berdasarkan data diatas untuk perkara pidana biasa jumlah perkara yang masuk tahun 2022 sebanyak 119.109 perkara dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 20.077 Perkara sehingga beban perkara pidana biasa tahun 2022 sebanyak 139.186 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil putus Sebanyak 118.047 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 84 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 86 %. Sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar 2%.

Sedangkan untuk pidana singkat jumlah perkara yang masuk tahun 2022 sebanyak 100 perkara dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 25 perkara. Sehingga beban perkara pidana singkat tahun 2022 sebanyak 125 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 105 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 84 %. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 88 %. Sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara menurun besar 4 %.

Untuk pidana cepat jumlah perkara yang masuk tahun 2022 sebanyak 16.354 perkara dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 115 perkara sehingga beban perkara pidana cepat tahun 2022 sebanyak 16.469 perkara, dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 16.353 perkara sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 99%. Dibanding dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 99%. Sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara sama besarnya dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 jumlah perkara lalu lintas sebanyak 2.590.903 perkara dengan jumlah denda sebesar Rp. 242.486.431.583,-, penyelesaian perkara lalu lintas sebesar 100%.

1.4. Jumlah Perkara Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

a. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Tindak Pidana Tipikor									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	12	88	100	0	65	35	41	21	11	0
2	Medan	47	106	153	0	98	55	13	13	7	0
3	Padang	7	47	54	0	38	16	46	27	6	0
4	Riau	26	102	128	0	92	36	8	1	8	0
5	Jambi	17	40	57	0	47	10	2	3	3	0
6	Palembang	18	78	96	0	81	15	76	42	12	0
7	Bengkulu	16	47	63	0	50	13	66	48	8	0
8	Tanjung Karang	17	45	62	0	36	26	39	28	0	0
9	Bangka Belitung	55	90	145	0	107	38	10	8	5	0
10	Jakarta	32	114	146	0	112	34	81	63	7	0
11	Bandung	66	137	203	0	106	97	14	14	1	0
12	Jawa Tengah	12	16	28	0	17	11	31	27	2	0
13	Yogyakarta	148	191	339	0	146	193	10	16	7	0
7	Surabaya	9	48	57	0	37	20	36	34	10	0
15	Banten	29	51	80	0	55	25	54	48	13	0
16	Denpasar	38	47	85	0	65	20	7	12	3	0
17	Nusa Tenggara Barat	15	56	71	0	54	17	35	40	2	0
18	Kupang	66	153	219	0	141	78	14	6	9	0
19	Pontianak	18	40	58	0	43	15	25	23	0	0
20	Palangkaraya	21	58	79	0	48	31	21	12	1	0
21	Banjarmasin	8	43	51	0	34	17	28	13	9	0
22	Kalimantan Timur	13	37	50	0	35	15	44	37	10	0
23	Manado	14	42	56	0	44	12	22	12	0	0
24	Sulawesi Tengah	21	92	113	0	92	21	20	12	1	0
25	Makassar	42	55	97	0	72	25	36	12	4	0
26	Sulawesi Tenggara	32	44	76	0	50	26	10	9	2	0
27	Gorontalo	12	46	58	0	43	15	11	12	2	0
28	Ambon	21	73	94	0	64	30	35	32	10	0
29	Maluku Utara	18	31	49	0	35	14	17	9	0	0
30	Jayapura	11	24	35	0	18	17	17	12	0	0
Total		861	2,041	2,902	0	1,925	977	869	646	153	0

Tabel 2. 15. Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

b. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pidana Khusus Anak									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	57	53	110	0	56	54	0	0	0	0
2	Medan	65	403	468	0	400	68	1	5	0	0
3	Padang	22	163	185	0	165	20	0	0	0	0
4	Riau	26	322	348	0	323	25	1	0	0	0
5	Jambi	24	112	136	0	116	20	0	0	0	0
6	Palembang	35	311	346	0	318	28	1	0	0	0
7	Bengkulu	17	195	212	0	192	20	1	0	0	0
8	Tanjung Karang	44	284	328	0	274	54	2	0	0	0
9	Bangka Belitung	9	54	63	0	57	6	0	0	0	0
10	Jakarta	52	126	178	0	132	46	0	0	0	0
11	Bandung	37	359	396	0	349	47	0	2	0	0
12	Jawa Tengah	45	277	322	0	290	32	0	0	0	0
13	Yogyakarta	18	104	122	0	102	20	0	0	0	0
14	Surabaya	84	416	500	0	408	92	2	5	0	0
15	Banten	33	209	242	0	202	40	1	2	0	0
16	Denpasar	14	43	57	0	41	16	1	0	0	0
17	Nusa Tenggara Barat	17	124	141	0	126	15	0	0	0	0
18	Kupang	11	54	65	0	54	11	1	0	0	0
19	Pontianak	13	132	145	0	132	13	0	0	0	0
20	Palangkaraya	3	46	49	0	45	4	1	0	0	0
21	Banjarmasin	12	97	109	0	97	12	3	0	0	0
22	Kalimantan Timur	23	166	189	0	158	31	0	0	0	0
23	Manado	13	146	159	0	142	17	0	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	26	72	98	0	77	21	0	0	0	0
25	Makassar	38	338	376	0	331	45	6	2	0	0
26	Sulawesi Tenggara	13	149	162	0	147	15	0	0	0	0
27	Gorontalo	16	17	33	0	16	17	0	1	0	0
28	Ambon	20	41	61	0	38	23	0	0	0	0
29	Maluku Utara	2	32	34	0	33	1	1	0	0	0
30	Jayapura	11	127	138	0	126	12	0	1	0	0
Total		800	4,972	5,772	0	4,947	825	22	18	0	0

Tabel 2. 16. Jumlah Perkara Pidana Khusus Anak

c. Jumlah Perkara Pidana Khusus Perikanan

NO	Pengadilan Tinggi	Perikanan									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Medan	1	8	9	0	8	1	1	0	0	0
2	Riau	1	12	13	0	12	1	1	1	0	0
3	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pontianak	1	8	9	0	8	1	0	0	0	0
5	Manado	2	4	6	0	4	2	0	0	0	0
6	Ambon	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
7	Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		5	36	41	0	36	5	2	1	0	0

Tabel 2. 17. Jumlah Perkara Pidana Khusus Perikanan

1.5. Jumlah Perkara Pidana Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Praperadilan									
		Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Grasi
1	Banda Aceh	11	17	28	1	18	9	0	0	0	0
2	Medan	3	159	162	11	140	11	0	0	0	0
3	Padang	11	35	46	0	36	10	0	0	0	0
4	Riau	1	63	64	5	56	3	0	0	0	0
5	Jambi	2	23	25	2	19	4	0	0	0	0
6	Palembang	1	72	73	3	66	4	0	0	0	0
7	Bengkulu	3	9	12	0	9	3	0	0	0	0
8	Tanjung Karang	4	27	31	4	22	5	0	0	0	0
9	Bangka Belitung	2	15	17	1	14	2	0	0	0	0
10	Jakarta	13	177	190	14	166	10	0	0	0	0
11	Bandung	0	104	104	8	96	0	1	0	0	0
12	Jawa Tengah	4	79	83	14	69	0	0	0	0	0
13	Yogyakarta	10	20	30	1	18	11	0	0	0	0
14	Surabaya	7	114	121	6	111	4	0	0	0	0
15	Banten	2	31	33	0	31	2	0	0	0	0
16	Denpasar	6	19	25	0	16	9	0	0	0	0
17	Nusa Tenggara Barat	5	26	31	3	23	5	0	0	0	0
18	Kupang	4	45	49	1	42	6	0	0	0	0
19	Pontianak	4	15	19	0	15	4	0	0	0	0
20	Palangkaraya	2	18	20	0	18	2	0	0	0	0
21	Banjarmasin	7	10	17	0	11	6	0	0	0	0
22	Kalimantan Timur	2	31	33	2	29	2	0	0	0	0
23	Manado	0	40	40	1	39	0	0	0	0	0
24	Sulawesi Tengah	3	24	27	1	25	1	0	0	0	0
25	Makassar	3	76	79	3	72	4	0	0	0	0
26	Sulawesi Tenggara	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	3	27	30	3	23	4	0	0	0	0
28	Ambon	2	17	19	1	13	5	0	0	0	0
29	Maluku Utara	2	21	23	2	19	2	0	0	0	0
30	Jayapura	7	40	47	1	35	11	0	0	0	0
Total		124	1,374	1,498	88	1,271	139	1	0	0	0

Tabel 2. 18. Jumlah Perkara Pidana Praperadilan

1.6. Jumlah Pelaku Tindak Pidana

a. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Biasa

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	3,505	144	3,649
2	Medan	13,574	687	14,261
3	Padang	3,670	224	3,894
4	Riau	8,049	441	8,490
5	Jambi	2,502	120	2,622
6	Palembang	6,800	316	7,116
7	Bengkulu	1,687	109	1,796
8	Tanjung Karang	4,987	166	5,153
9	Bangka Belitung	1,292	95	1,387
10	Jakarta	5,780	454	6,234
11	Bandung	10,679	455	11,134
12	Jawa Tengah	7,813	430	8,243
13	Yogyakarta	1,844	156	2,000
14	Surabaya	16,710	865	17,575
15	Banten	4,443	191	4,634
16	Denpasar	2,044	195	2,239
17	Nusa Tenggara Barat	2,183	141	2,324
18	Kupang	2,029	114	2,143
19	Pontianak	3,938	298	4,236
20	Palangkaraya	2,709	218	2,927
21	Banjarmasin	4,350	254	4,604
22	Kalimantan Timur	5,047	298	5,345
23	Manado	1,869	189	2,058
24	Sulawesi Tengah	2,112	145	2,257
25	Makassar	6,418	578	6,996
26	Sulawesi Tenggara	1,925	140	2,065
27	Gorontalo	564	88	652
28	Ambon	944	95	1,039
29	Maluku Utara	587	51	638
30	Jayapura	2,364	167	2,531
Total		132,418	7,824	140,242

Tabel 2. 19. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Biasa

b. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana Khusus Tipikor		
		Dewasa		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Banda Aceh	102	6	108
2	Medan	87	19	106
3	Padang	44	9	53
4	Riau	94	9	103
5	Jambi	35	7	42
6	Palembang	107	8	115
7	Bengkulu	50	3	53
8	Tanjung Karang	42	4	46
9	Bangka Belitung	28	3	31
10	Jakarta	87	7	94
11	Bandung	118	10	128
12	Jawa Tengah	136	10	146
13	Yogyakarta	13	2	15
14	Surabaya	190	27	217
15	Banten	70	8	78
16	Denpasar	28	15	43
17	Nusa Tenggara Barat	38	6	44
18	Kupang	99	8	107
19	Pontianak	43	6	49
20	Palangkaraya	50	3	53
21	Banjarmasin	41	8	49
22	Kalimantan Timur	52	13	65
23	Manado	33	11	44
24	Sulawesi Tengah	49	9	58
25	Makassar	138	23	161
26	Sulawesi Tenggara	39	2	41
27	Gorontalo	21	3	24
28	Ambon	49	10	59
29	Maluku Utara	46	1	47
30	Jayapura	43	4	47
Total		1,972	254	2,226

Tabel 2. 20. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

c. Jumlah Pelaku Tindak Pidana Anak

NO	Pengadilan Tinggi	Pelaku Tindak Pidana Anak		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Banda Aceh	74	1	75
2	Medan	433	16	449
3	Padang	167	1	168
4	Pekanbaru	344	14	358
5	Jambi	118	2	120
6	Palembang	325	7	332
7	Bengkulu	207	6	213
8	Tanjung Karang	300	2	302
9	Bangka Belitung	58	1	59
10	Jakarta	176	1	177
11	Bandung	387	12	399
12	Jawa Tengah	283	9	292
13	Yogyakarta	112	4	116
14	Surabaya	434	18	452
15	Banten	305	5	310
16	Denpasar	49	5	54
17	Nusa Tenggara Barat	121	0	121
18	Kupang	44	0	44
19	Pontianak	117	14	131
20	Palangkaraya	42	2	44
21	Banjarmasin	91	5	96
22	Kalimantan Timur	172	1	173
23	Manado	161	2	163
24	Sulawesi Tengah	75	2	77
25	Makassar	369	11	380
26	Sulawesi Tenggara	154	14	168
27	Gorontalo	12	0	12
28	Ambon	47	0	47
29	Maluku Utara	35	0	35
30	Jayapura	142	1	143
Total		5,354	156	5,510

Tabel 2. 21. Pelaku Tindak Pidana Anak

1.7. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi Pada Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Diversi				
		Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	JUMLAH
1	Banda Aceh	6	0	0	0	6
2	Medan	4	3	4	0	3
3	Padang	0	2	2	0	0
4	Riau	1	2	1	1	1
5	Jambi	2	1	1	0	2
6	Palembang	4	1	0	1	4
7	Bengkulu	1	2	1	1	1
8	Tanjung Karang	3	2	2	0	3
9	Bangka Belitung	0	0	0	0	0
10	Jakarta	0	3	0	3	0
11	Bandung	0	1	1	0	0
12	Jawa Tengah	1	0	0	0	1
13	Yogyakarta	1	2	0	2	1
14	Surabaya	9	4	2	2	9
15	Banten	4	13	0	13	4
16	Denpasar	0	1	1	0	0
17	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	1
18	Kupang	4	0	0	0	4
19	Pontianak	3	1	1	0	3
20	Palangkaraya	0	0	0	0	0
21	Banjarmasin	2	0	0	1	1
22	Kalimantan Timur	4	2	1	1	4
23	Manado	3	1	0	1	3
24	Sulawesi Tengah	1	2	2	0	1
25	Makassar	32	7	2	5	32
26	Sulawesi Tenggara	4	7	4	3	4
27	Gorontalo	0	0	0	0	0
28	Ambon	4	0	0	0	4
29	Maluku Utara	0	1	1	0	0
30	Jayapura	0	2	1	1	0
Total		94	60	27	35	92

Tabel 2. 22. Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Melalui Diversi

1.8. Statistik Aktivasi E-Court Pengadilan Negeri pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

NO	Pengadilan Tinggi	Daftar Online	Bayar	SKUM	Register	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Gugatan Sederhana	Total
1	Banda Aceh	2,965	1,862	1,204,567,500	1,874	281	1,525	20	21	1,847
2	Medan	10,025	6,045	6,530,098,010	5,924	2,586	3,144	56	138	5,924
3	Padang	3,271	1,756	2,916,657,277	1,726	682	811	20	213	1,726
4	Riau	5,790	3,757	3,937,161,000	3,597	1,400	1,931	44	222	3,597
5	Jambi	2,253	1,257	1,709,424,000	1,204	483	490	11	220	1,204
6	Palembang	3,139	2,143	2,646,295,000	2,101	587	896	19	599	2,101
7	Bengkulu	858	552	307,158,000	537	137	359	7	34	537
8	Tanjung Karang	2,650	1,656	1,495,869,000	1,632	570	948	19	95	1,632
9	Bangka Belitung	888	633	491,590,000	618	207	341	3	67	618
10	Jakarta	17,180	10,388	12,164,988,500	9,923	4,650	5,028	98	147	9,923
11	Bandung	19,290	11,576	11,349,732,000	10,975	3,576	6,598	109	692	10,975
12	Jawa Tengah	15,073	9,932	7,673,221,021	9,427	2,891	5,185	120	1,231	9,427
13	Yogyakarta	4,245	2,619	1,632,163,000	2,574	646	1,774	15	139	2,574
14	Surabaya	22,635	15,881	12,738,135,500	15,428	4,148	9,854	177	1,249	15,428
15	Banten	6,520	3,646	6,274,180,000	3,508	1,585	1,767	29	127	3,508
16	Denpasar	8,244	5,601	5,421,301,000	5,459	3,413	1,926	53	67	5,459
17	Nusa Tenggara Barat	4,109	2,406	2,670,848,000	2,217	655	1,348	41	173	2,217
18	Kupang	3,255	1,981	2,431,467,500	1,932	871	934	20	107	1,932
19	Pontianak	4,408	3,254	1,498,012,000	3,147	730	2,351	3	63	3,147
20	Palangkaraya	1,804	1,303	1,362,991,500	1,280	582	646	7	45	1,280
21	Banjarmasin	2,298	1,591	1,338,180,000	1,556	570	862	5	119	1,556
22	Kalimantan Timur	4,801	2,688	2,397,140,000	2,624	1,094	1,435	18	77	2,624
23	Manado	6,496	4,299	4,266,089,555	4,199	2,067	1,787	21	324	4,199
24	Sulawesi Tengah	1,852	864	1,813,478,750	813	474	239	11	89	813
25	Makassar	6,823	4,169	4,631,968,500	4,005	1,513	2,240	98	154	4,005
26	Sulawesi Tenggara	1,638	811	1,314,853,000	790	361	369	11	49	790
27	Gorontalo	748	380	503,800,000	362	161	153	1	47	362
28	Ambon	1,922	870	1,295,206,000	729	421	296	4	8	729
29	Maluku Utara	797	462	1,347,843,000	457	238	169	0	50	457
30	Jayapura	3,032	2,031	1,245,288,000	1,978	602	1,275	6	95	1,978
Total		169,009	106,413	106,609,706,613	102,596	38,181	56,681	1,046	6,661	102,569

Tabel 2. 23. Statistik E-Court

2. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Tinggi

2.1. Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tinggi

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	1,055	Perkara
-	Perkara Masuk	:	7,709	Perkara
-	Beban	:	8,764	Perkara
-	Perkara Putus	:	7,570	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	1,194	Perkara

Tabel 2. 24 Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2022 sebanyak 7.709 perkara dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1.055 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2022 sebanyak 8.764 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 7.570 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 86 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 87 %, sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar meningkat 1 %.

2.2. Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

-	Sisa Perkara Tahun 2021	:	1,146	Perkara
-	Perkara Masuk	:	11,998	Perkara
-	Beban	:	13,144	Perkara
-	Perkara Putus	:	11,673	Perkara
-	Sisa Perkara Tahun 2022	:	1,471	Perkara

Tabel 2. 25 Jumlah Perkara Pidana Pengadilan Tinggi

Jumlah perkara yang masuk tahun 2022 sebanyak 11.998 perkara dimana sisa perkara tahun 2021 sebanyak 1.146 perkara sehingga beban perkara pada tahun 2022 sebanyak 13.144 perkara. Dari jumlah beban perkara pada tahun 2022 berhasil diputus sebanyak 11.673 sehingga persentase penyelesaian perkara tahun 2022 sebesar 88 %. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase penyelesaian perkara sebesar 91 %, sehingga pada tahun 2022 persentase penyelesaian perkara menurun sebesar meningkat 3 %.

C. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan

1. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri

1.1. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

a. Gugatan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	15,302	Perkara
	2	:	5,352	Perkara
	3	:	4,143	Perkara
	4	:	4,044	Perkara
	5	:	3,729	Perkara
	>5	:	7,455	Perkara
Total			40,025	Perkara

Tabel 2. 26. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan

b. Permohonan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	59,615	Perkara
	2	:	193	Perkara
	3	:	61	Perkara
	4	:	19	Perkara
	5	:	19	Perkara
	>5	:	38	Perkara
Total			59,945	Perkara

Tabel 2. 27. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Permohonan

c. Gugatan Sederhana

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	1,292	Perkara
	2	:	1,090	Perkara
	3	:	1,325	Perkara
	4	:	1,335	Perkara
	5	:	1,045	Perkara
	>5	:	557	Perkara
Total			6,644	Perkara

Tabel 2. 28. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana

d. Perlawanan/Bantahan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	197	Perkara
	2	:	60	Perkara
	3	:	104	Perkara
	4	:	146	Perkara
	5	:	133	Perkara
	>5	:	350	Perkara
Total			990	Perkara

Tabel 2. 29. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perlawanan/Bantahan

1.2. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata Khusus

a. Kepailitan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	83	Perkara
	2	:	15	Perkara
	3	:	2	Perkara
	4	:	2	Perkara
	5	:	2	Perkara
	>5	:	0	Perkara
Total			104	Perkara

Tabel 2. 30. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Kepailitan

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	311	Perkara
	2	:	87	Perkara
	3	:	35	Perkara
	4	:	21	Perkara
	5	:	25	Perkara
	>5	:	76	Perkara
Total			555	Perkara

Tabel 2. 31. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara PKPU

c. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	20	Perkara
	2	:	22	Perkara
	3	:	36	Perkara
	4	:	22	Perkara
	5	:	13	Perkara
	>5	:	36	Perkara
Total			149	Perkara

Tabel 2. 32. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara HAKI

d. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	557	Perkara
	2	:	783	Perkara
	3	:	674	Perkara
	4	:	293	Perkara
	5	:	147	Perkara
	>5	:	88	Perkara
Total			2,542	Perkara

Tabel 2. 33. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara PHI

1.3. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

a. Pidana

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	89,811	Perkara
	2	:	37,158	Perkara
	3	:	5,176	Perkara
	4	:	1,981	Perkara
	5	:	201	Perkara
	>5	:	235	Perkara
Total			134,562	Perkara

Tabel 2. 34. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana

b. Pidana Biasa

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	73,355	Perkara
	2	:	37,156	Perkara
	3	:	5,175	Perkara
	4	:	1,981	Perkara
	5	:	201	Perkara
	>5	:	235	Perkara
Total			118,103	Perkara

Tabel 2. 35. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

c. Pidana Singkat

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	102	Perkara
	2	:	2	Perkara
	3	:	1	Perkara
	4	:	0	Perkara
	5	:	0	Perkara
	>5	:	0	Perkara
Total			105	Perkara

Tabel 2. 36. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

d. Pidana Cepat

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	16,353	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	0	Perkara
	4	:	0	Perkara
	5	:	0	Perkara
	>5	:	0	Perkara
Total			16,353	Perkara

Tabel 2. 37. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

1.4. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

a. Pidana Anak

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	4,793	Perkara
	2	:	94	Perkara
	3	:	38	Perkara
	4	:	10	Perkara
	5	:	2	Perkara
	>5	:	10	Perkara
Total			4,947	Perkara

Tabel 2. 38. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak

b. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	47	Perkara
	2	:	293	Perkara
	3	:	410	Perkara
	4	:	1,069	Perkara
	5	:	34	Perkara
	>5	:	74	Perkara
Total			1,927	Perkara

Tabel 2. 39. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (KORUPSI)

c. Perikanan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	31	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	1	Perkara
	4	:	4	Perkara
	5	:	0	Perkara
	>5	:	0	Perkara
Total			36	Perkara

Tabel 2. 40. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perikanan

1.5. Rerata Waktu Penyelesaian Pidana Praperadilan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	1	:	1,244	Perkara
	2	:	27	Perkara
	3	:	7	Perkara
	4	:	0	Perkara
	5	:	0	Perkara
	>5	:	0	Perkara
Total			1,278	Perkara

Tabel 2. 41. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Praperadilan

2. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tinggi

2.1. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

a. Gugatan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	6,152	Perkara
	2	:	696	Perkara
	3	:	41	Perkara
	>3	:	6	Perkara
Total		:	6,895	Perkara

Tabel 2. 42. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan

b. Perlawanan/Bantahan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	318	Perkara
	2	:	32	Perkara
	3	:	3	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total		:	353	Perkara

Tabel 2. 43. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perlawanan/Bantahan

2.2. Rerata Waktu penyelesaian Perkara Pidana

a. Pidana Biasa

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	9,713	Perkara
	2	:	75	Perkara
	3	:	3	Perkara
	>3	:	1	Perkara
Total		:	9,792	Perkara

Tabel 2. 44. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Biasa

b. Pidana Singkat

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	3	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	0	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total		:	3	Perkara

Tabel 2. 45. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Singkat

c. Pidana Cepat

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	29	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	0	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total			29	Perkara

Tabel 2. 46. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Cepat

2.3. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Khusus

a. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	744	Perkara
	2	:	20	Perkara
	3	:	0	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total			764	Perkara

Tabel 2. 47. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)

b. Perikanan

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	4	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	0	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total			4	Perkara

Tabel 2. 48. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Perikanan

c. Anak

Rerata Waktu (dalam Bulan)	<=1	:	385	Perkara
	2	:	0	Perkara
	3	:	0	Perkara
	>3	:	0	Perkara
Total			385	Perkara

Tabel 2. 49. Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Anak

D. Layanan Hukum

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum yang membutuhkan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pemanfaatan posbakum di pengadilan pengadilan setiap tahun ada peningkatan dan penurunan jumlah layanan. Berikut rincian rekap bulanan laporan posbakum di pengadilan:

NO	Bulan	Jenis Layanan			Laki-Laki		Perempuan	
		Informasi	Dokumen	Info Organisasi	Difabel	Non	Difabel	Non
1	Januari	3,277	1,231	659	62	2,213	14	1,759
2	Februari	3,276	1,076	757	22	2,090	23	1,741
3	Maret	3,991	1,517	863	39	2,621	41	2,149
4	April	3,715	1,361	878	25	2,528	23	1,808
5	Mei	3,411	979	629	27	2,294	17	1,642
6	Juni	4,428	1,649	853	24	2,955	36	2,334
7	Juli	4,248	1,555	768	33	2,976	42	2,223
8	Agustus	3,761	1,339	595	23	2,632	39	1,973
9	September	4,292	1,532	740	25	2,890	10	2,236
10	Oktober	3,826	1,365	666	37	2,502	25	2,040
11	November	2,390	1,014	508	8	1,810	10	1,347
12	Desember	3,097	996	567	1	2,075	3	1,675
Jumlah		43,712	15,614	8,483	326	29,586	283	22,927
Total		67,809			29,912		23,210	
Jumlah Orang					53,122			

Tabel 2. 50. Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)

Jenis layanan pada Posbakum tahun 2022 berjumlah 67.809, sedangkan jumlah orang yang dilayani sebanyak 53.122 jenis kelamin laki-laki sebanyak 29.912 dan Perempuan 23.210

2. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung pengadilan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri disuatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dengan pertimbangan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dengan kriteria sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum no 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, aktakelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;
2. Apabila fasilitas gedung sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*) tidak layak dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan di tempat tersebut, maka ketua Pengadilan diminta dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat atau instansi lain untuk menyediakan tempat/ruangan yang layak untuk sidang.
3. Sidang di luar gedung Pengadilan yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat menggunakan atribut persidangan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan baik yang dilakukan di tempat sidang tetap (*zitting plaats*), atau pada kantor pemerintah daerah setempat. Pengawasan melekat yang dimaksud meliputi pencatatannya pada SIPP, penggunaan alokasi

anggaran sidang diluar gedung pengadilan serta laporan pelaksanaan melalui pelaporan elektronik;

5. Apabila diperlukan, dalam pelaksanaannya sidang diluar gedung Pengadilan dapat sertakan dengan pelayanan posbakum dan mediasi;
6. Ketua Pengadilan Tinggi melalui hakim pengawas daerah yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan per tri wulan.

Berikut adalah data Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2022:

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	37
2	Februari	93
3	Maret	257
4	April	24
5	Mei	39
6	Juni	106
7	Juli	101
8	Agustus	63
9	September	115
10	Oktober	102
11	November	98
12	Desember	24
Jumlah		1,059

Tabel 2. 51. Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Jumlah sidang diluar gedung pada Pengadilan Tahun 2022 sebanyak 1.059 Perkara

3. Pembebasan Biaya Perkara

Perkara prodeo atau pembebasan biaya perkara biasa di peruntukan bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berpekara secara Cuma-Cuma, baik melalui anggaran DIPA yang diberikan oleh negara maupun pembebasan biaya perkara melalui mekanisme prodeo murni seperti yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014. Berikut data pembebasan perkara.

No	Bulan	Jenis		Permohonan			Jenis Perkara					
		DIPA	Mumi	Laki-Laki	Perempuan	Badan Hukum	Perdata Gugatan	Perdata Gugatan Sederhana	Kepailitan	PHI	Perdata Perlawanan	Perdata Permohonan
1	Januari	87	41	120	41	10	4	0	3	121	0	0
2	Februari	70	26	85	34	11	9	0	1	83	0	3
3	Maret	41	20	45	17	5	5	0	2	49	0	5
4	April	99	109	178	68	6	2	0	0	201	0	5
5	Mei	88	39	97	48	13	5	0	0	117	0	5
6	Juni	227	94	246	178	17	11	0	0	297	0	13
7	Juli	106	63	168	126	4	7	0	0	158	0	4
8	Agustus	105	105	162	135	14	8	0	0	189	0	13
9	September	92	29	99	41	8	6	0	0	104	0	11
10	Oktober	97	34	110	43	10	15	0	0	104	0	12
11	November	65	20	78	49	2	3	1	0	78	0	3
12	Desember	92	29	99	41	8	6	0	0	104	0	11
Jumlah		1,169	609	1,487	821	108	81	1	6	1,605	0	85
Total		1,778		2,416			1,778					

Tabel 2. 52. Jumlah Pembebasan Biaya Perkara

Jumlah pengadilan pemberi layanan tahun 2022 untuk Jenis sebanyak 1.778, permohonan sebanyak 2.416 dan untuk jenis perkara sebanyak 1.778.

4. Restorative Justice

Keadilan restorative (*restorative justice*) adalah salah satu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan penyelesaian perkaa tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku. Korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan Restorative Justice sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan seperti peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelesaian perkara yang bisa melalui keadilan restorative (*restorative justice*) seperti tidak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Berikut data yang Restorative Justice:

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	38
2	Februari	36
3	Maret	39
4	April	37
5	Mei	21
6	Juni	59
7	Juli	102
8	Agustus	70
9	September	91
10	Oktober	105
11	November	90
12	Desember	58
Jumlah		746

Tabel 2. 53. Jumlah Perkara Restorative Justice

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. Sumber Daya Manusia Teknis Yustisial

1. Data Hakim

a. Jumlah Hakim Seluruh Indonesia

- Jumlah Hakim per Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketua Pengadilan Tinggi	28	2	30
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	19	6	25
3	Hakim Pengadilan Tinggi	559	121	680
4	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I	18	15	33
5	Hakim Tinggi Yustisial M.A.R.I/Balitbang Diklat Kumdil	10	3	13
6	Hakim Tinggi Yustisial Bawas M.A.R.I	25	7	32
7	Hakim Tinggi Yustisial pada Pengadilan Tinggi	21	8	29
8	Hakim Tinggi Non Palu pada Pengadilan Tinggi	1	-	1
9	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Khusus	14	1	15
10	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	10	5	15
11	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A khusus	351	94	445
12	Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	46	8	54
13	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas I A	40	7	47
14	Hakim Pengadilan Negeri Klas I A	380	231	611
15	Ketua Pengadilan Negeri Klas I B	85	28	113
16	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IB	73	25	98
17	Hakim Pengadilan Negeri Klas I B	427	248	675
18	Ketua Pengadilan Negeri Klas II	127	50	177
19	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas II	93	52	145
20	Hakim Pengadilan Negeri Klas II	712	332	1,044
21	Hakim Yustisial M.A.R.I	80	43	123
22	Hakim Yustisial M.A.R.I/ Diklat Kumdil	-	5	5
23	Hakim Yustisial pada Sektim Bawas	15	5	20
24	Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi	25	10	35
25	Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi	17	3	20
Total		3,176	1,309	4,485

Tabel 3. 1. Data Jumlah Hakim Pergender

- Kenaikan Pangkat Hakim

		April		Oktober	
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	1,143	Orang	26	Orang
-	Kenaikan Pangkat Struktural	129	Orang	6	Orang
-	Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	57	Orang	16	Orang
Total		1,329	Orang	48	Orang

Tabel 3. 2. Kenaikan Pangkat Hakim

- Hakim Karir

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi	159
2	Hakim Tipikor Pengadilan Negeri	207
3	Hakim Lingkungan Pengadilan Tinggi	128
4	Hakim Lingkungan Pengadilan Negeri	517
5	Hakim Niaga	46
6	Hakim PHI	93
7	Hakim Perikanan	16
8	Hakim Anak Pengadilan Tinggi	263
9	Hakim Anak Pengadilan Negeri	1,842
10	Hakim Pemilu Pengadilan Tinggi	435
11	Hakim Pemilu Pengadilan Negeri	2,600
12	Hakim HAM Pengadilan Tinggi	5
13	Hakim HAM Pengadilan Negeri	8
Total		6,319

Tabel 3. 3. Jumlah Hakim Karir

- Hakim Ad Hoc

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi	89
2	Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri	106
3	Hakim Ad Hoc PHI	117
4	Hakim Ad Hoc Perikanan	42
5	Hakim Ad Hoc HAM Pengadilan Tinggi	4
6	Hakim Ad Hoc Ham Pengadilan Negeri	4
Total		362

Tabel 3. 4. Jumlah Hakim Ad Hoc

b. Promosi dan Mutasi Hakim

- Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri

-	Ketua Pengadilan Negeri	255	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	228	Orang
-	Penempatan Cakim	-	Orang
-	Hakim Pengadilan Negeri	432	Orang
-	Hakim Yustisial MA RI/Asisten Hakim Agung/Biro Humas	4	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Bawas	-	Orang
-	Hakim Yustisial MA/ Diklat	-	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Badilum	-	Orang
-	Hakim Yustisial PT	2	Orang
-	Hakim Non Palu (Hukdis)	8	Orang
Total		929	Orang

Tabel 3. 5. Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri

- Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi

-	Ketua Pengadilan Tinggi	13	Orang
-	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	21	Orang
-	Hakim Pengadilan Tinggi	133	Orang
-	Hakim Yustisial MA	-	Orang
-	Hakim Yustisial MA/ DIP Bawas	-	Orang
-	Hakim Tinggi Yustisial PT	-	Orang
-	Hakim Yustisial MA/Diklat	-	Orang
Total		167	Orang

Tabel 3. 6. Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Tinggi

- Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc

-	Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Tinggi	27	Orang
-	Penempatan Tipikor Hakim Pengadilan Negeri	32	Orang
-	Penempatan Hakim Ad Hoc Perikanan	11	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Banding	2	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Tipikor Tk. Pertama	5	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	5	Orang
-	Mutasi Hakim Ad Hoc Perikanan	-	Orang
Total		82	Orang

Tabel 3. 7. Mutasi dan Penempatan Hakim Ad Hoc

c. Hukuman Disiplin Hakim

		Berat	Sedang	Ringan	Jumlah
-	Hakim Pengadilan Negeri	13	14	41	68
-	Hakim Pengadilan Tinggi	2	3	5	10
-	Hakim Ad Hoc Tipikor PN	-	-	1	1
-	Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri	-	1	-	1
Total		15	18	47	80

Tabel 3. 8. Jumlah Hukuman Disiplin Hakim

d. Pensiun, Pemberhentian dan Meninggal Dunia Hakim

		Pensiun	Diberhentikan	Mengundurkan Diri	Meninggal
-	Hakim Pengadilan Negeri	16	2	-	24
-	Hakim Pengadilan Tinggi	52	-	-	8
-	Hakim Ad Hoc	-	-	1	-
Total		68	2	1	32

Tabel 3. 9. Jumlah Pensiun, Pemberhentian dan Meninggal Dunia Hakim

e. Pendidikan dan Pelatihan Hakim

-	Diklat SPPA	93	Orang
-	Diklat Lingkungan Hidup	181	Orang
-	Diklat Tipikor	87	Orang
-	Diklat Mediator	138	Orang
-	Diklat PHI	175	Orang
-	Diklat HKI	38	Orang
-	Kerjasama Dengan KY	197	Orang
-	Kejahatan Kemaritiman	60	Orang
	Total	969	Orang

Tabel 3. 10. Pendidikan dan Pelatihan Hakim

2. Data Panitera dan Jurusita

f. Jumlah Panitera dan Jurusita Seluruh Indonesia

- Jumlah Panitera dan Jurusita Per Pengadilan Tinggi dan Kelas Pengadilan Negeri

No	Jabatan	PT	PN IAK	PN IA	PN IB	PN II	Jumlah
1	Panitera	34	53	15	107	196	405
2	Panitera Muda Pidana	29	52	15	107	182	385
3	Panitera Muda Perdata	32	51	14	112	177	386
4	Panitera Muda Hukum	33	49	15	104	179	380
5	Panitera muda Tipikor	29	24	7	1	0	61
6	Panitera Muda PHI	0	25	7	1	0	33
7	Panitera Muda Perikanan	0	3	2	2	1	8
8	Panitera Muda Niaga	0	0	5	0	0	5
9	Panitera Pengganti	543	701	496	705	566	3,011
10	Jurusita	0	213	87	275	292	867
11	Jurusita Pengganti	0	256	240	274	176	946
	Total	700	1,427	903	1,688	1,769	6,487

Tabel 3. 11. Jumlah Panitera dan Jurusita Per Pengadilan Tinggi dan Kelas Pengadilan Negeri

- Kenaikan Pangkat Panitera dan Jurusita

		April		Oktober	
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	598	Orang	162	Orang
-	Kenaikan Pangkat Struktural	4	Orang	72	Orang
-	Kenaikan Pangkat Golongan IV/c	7	Orang	3	Orang
Total		609	Orang	237	Orang

Tabel 3. 12. Kenaikan Pangkat Panitera dan Jurusita

g. Promosi, Mutasi Panitera dan Jurusita

No	Jabatan	Jumlah Mutasi PT		Jumlah Mutasi PN	
1	Panitera	10	Orang	163	Orang
2	Panitera Muda	51	Orang	512	Orang
3	Mutasi Panitera Pengganti	62	Orang	234	Orang
4	Pengangkatan Panitera Pengganti	46	Orang	101	Orang
5	Mutasi Jurusita	0	Orang	13	Orang
6	Pengangkatan Jurusita	0	Orang	158	Orang
7	Lepas Jabatan Pandmud	0	Orang	0	Orang
8	Lepas Jabatan PP	0	Orang	6	Orang
9	Lepas Jabatan JS	0	Orang	2	Orang
Total		169	Orang	1,189	Orang

Tabel 3. 13. Promosi, Mutasi Panitera dan Jurusita

h. Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita

No	Jabatan	Jumlah Hukdis Ringan	Jumlah Hukdis Sedang	Jumlah Hukdis Berat	Jumlah
1	Panitera	6	1	0	7
2	Panitera Muda Hukum	1	1	1	3
3	Panitera Muda Niaga	0	0	0	0
4	Panitera Muda Perdata	3	2	1	6
5	Panitera Perikanan	0	0	0	0
6	Panitera PHI	0	0	1	1
7	Panitera Muda Pidana	2	2	0	4
8	Panitera Muda Tipikor	0	0	0	0
9	Panitera Pengganti	12	1	4	17
10	Jurusita	0	1	0	1
11	Jurusita Pengganti	4	0	2	6
Total		28	8	9	45

Tabel 3. 14. Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita

i. Pensiun, Meninggal Panitera dan Jurusita

No	Jabatan	Jumlah			
		Pensiun		Meninggal	
		PT	PN	PT	PN
1	Panitera	3	4	0	0
2	Panitera Muda Hukum	1	15	0	0
3	Panitera Muda Niaga	0	0	0	0
4	Panitera Muda Perdata	8	12	0	0
5	Panitera Perikanan	0	1	0	0
6	Panitera PHI	0	0	0	0
7	Panitera Muda Pidana	7	9	0	4
8	Panitera Muda Tipikor	3	0	1	0
9	Panitera Pengganti	92	164	4	18
10	Jurusita	0	32	0	4
11	Jurusita Pengganti	0	51	0	5
Total		114	288	5	31

Tabel 3. 15. Pensiun, Meninggal Panitera dan Jurusita

B. Sumber Daya Manusia Non Yustisial

1. Data Pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 115 (seratus lima belas) dengan sebaran jabatan sebagai berikut:

Dipimpin oleh eselon I yaitu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan dibantu oleh 5 eselon II, terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum 1 orang; Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 1 orang, 11 orang eselon III, 32 orang eselon IV, 22 orang fungsional, 0 orang Hakim Yustisial, 32 orang Pelaksana serta 14 CPNS.

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2022

No	Unit	Es. I	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungsional	Hakim Yustisial	Pelaksana	CPNS	Jumlah	Keterangan
1	Pimpinan	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
2	Sekretariat	-	1	4	11	9	-	13	5	43	
3	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	-	1	4	12	14	-	10	4	45	
4	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	-	1	3	9	-	-	9	5	27	
Jumlah		1	3	11	32	23	0	32	14	116	

Tabel 3. 16. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

- Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan Ruang		Jumlah	Total
1	Golongan II	II/a	-	5
		II/b	-	
		III/c	2	
		III/d	3	
2	Golongan III	III/a	23	91
		III/b	22	
		III/c	20	
		III/d	26	
3	Golongan IV	IV/a	10	20
		IV/b	5	
		IV/c	2	
		IV/d	3	
Jumlah				116

Tabel 3. 17. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

- Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Gender Tahun 2022

Golongan	Ruangan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Pendidikan										Keterangan
					S3		S2		S1		D3		SLTA		
		L	P		L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV	E	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	D	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	C	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	B	3	3	6	-	-	5	3	1	-	-	-	-	-	
	A	7	3	10	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	
III	D	13	12	25	1	-	3	4	10	8	-	-	-	-	
	C	11	10	21	-	-	-	3	7	7	-	-	1	-	
	B	6	16	22	-	-	-	2	5	7	-	2	1	5	
	A	14	9	23	-	-	-	-	14	7	-	2	-	-	
II	D	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	C	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
	B	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		58	58	116	1	0	15	16	39	29	0	7	3	6	
Jumlah					116										

Tabel 3. 18. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat, Pendidikan dan Gender

2. Pelatihan, Diklat dan Asessment

Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat sebanyak 5 orang, diklat Kepemimpinan Tk. IV Tahun 2022 berjumlah 4 orang dan diklat Administrator/Diklat Kepemimpinan Tk. III berjumlah 1 orang. Sedangkan yang mengikuti Assesmen sebanyak 20 Orang.

3. Rekrutmen, Latsar dan Piagam

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tidak melaksanakan rekrutmen bagi tenaga teknis maupun non teknis namun melakukan rekrutmen untuk tenaga pramubakti untuk tahun 2022 tidak ada pengangkatan. Sedangkan yang mengikuti Latsar sebagai CPNS sebanyak 13 Orang. Dan penerima penghargaan Piagam dan Satya Lencana dengan

jenis penghargaan XXX sebanyak 2 orang, XX sebanyak 3 sedangkan dengan jenis Dwi Windu sebanyak 23 Orang

4. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

Jenis	Pensiun	Meninggal	Pindah/Keluar
Data	3	-	-
Jumlah	3		

Tabel 3. 19. Pensiun, Meninggal dan Pindah/Keluar

5. Kenaikan Pangkat

		Bulan	
		April	Oktober
-	KPO (Kenaikan Pangkat Otomatis)	3	-
-	Kenaikan Pangkat Struktural	3	1
-	Fungsional	-	5
Jumlah		6	6

Tabel 3. 20. Kenaikan Pangkat

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA/005.03.1.3097/2020 Tanggal 23 November 2020 dengan 1 (satu) Program Kerja yaitu **“Peningkatan Manajemen Peradilan Umum”** dilaksanakan berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 497/DJU/PL08/4/2012 tentang Pelaksanaan anggaran DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas KKN.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp 140.447.558.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewenangan	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	Presentasi (%)
1	Pusat	Belanja Pegawai	9,370,644,000	9,304,478,331	99.29
2		Belanja Barang	48,388,073,000	48,029,714,806	99.26
3		Belanja Modal	1,127,345,000	1,097,471,100	97.35
Jumlah			58,886,062,000	58,431,664,237	99.23
4	Daerah	Pagu Daerah	81,561,496,000	79,327,644,410	97.26
Jumlah			140,447,558,000	137,759,308,647	98.09

Tabel 4. 1. Pagu Anggaran Tahun 2022

Dari pagu anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 58.886.062.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp. 58.431.664.237,- (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan serapan sebesar 99,23%, sedangkan pagu anggaran

daerah sebesar Rp.81.561.496.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.79.237.644.410,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) dengan persentase penyerapan sebesar 97,26%. Sehingga jumlah alokasi seluruhnya sebesar Rp 140.447.558.000- (Seratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp. 137.759.308.647,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau 98.09%.

**Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun Anggaran 2022**

NO	KODE DAN NAMA KEGIATAN	ANGGARAN						Kinerja (%)	
		PAGU		REALISASI		SISA ANGGARAN	REALISASI %	TARGET	REALISASI
(005.03.07)									
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM									
1	(1046) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp	1,500,000,000	Rp	1,458,311,181	41,688,819	97.22	100%	100%
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	81,764,024,000	Rp	79,525,413,110	2,238,610,890	97.26	100%	100%
3	Dukungan Manajemen Dukungan Teknis Lainnya Dijen Badan Peradilan Umum	Rp	49,147,004,000	Rp	48,894,795,697	252,208,303	99.49	100%	100%
4	(6627) Dukungan Manajemen Teknis Peradilan Umum	Rp	5,213,691,000	Rp	5,105,467,940	108,223,060	97.92	100%	100%
5	(6628) Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Rp	1,000,000		0	1,000,000	0.00	100%	100%
6	(6629) Dukungan Manajemen Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Rp	1,000,000	Rp	0	1,000,000	0.00	100%	100%
7	(6630) Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	Rp	2,820,839,000	Rp	2,792,414,119	28,424,881	98.99	100%	100%
Jumlah		Rp	140,447,558,000	Rp	137,776,402,047	2,671,155,953	98.10	100%	100%

Tabel 4. 2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Manajemen Aset/Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, selama periode Tahun Anggaran 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola Aset/Barang Milik Negara meliputi:

1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk kepentingan dinas jabatan yaitu didirikan gedung dan bangunan rumah negara/dinas yang diperuntukan untuk para hakim, pejabat dan pegawai di lingkungan peradilan umum.

Tanah yang di kelola dan tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
1	Jl. Sitalasari No B2 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	1	352	No. 3571394 Hak Pakai No 62
2	Jl. Sitalasari No B1 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	2	398	No. 3571396 Hak Pakai No 64
3	Jl. Sitalasari No B3 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	3	296	No. 3571396 Hak Pakai No 67
4	Jl. Sitalasari No C4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	4	416	No. 3567643 Hak Pakai No 68
5	Jl. Sitalasari No B4 Rt. 02 Rw 03 Kel. Cipinang Muara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	5	335	No. 3569803 Hak Pakai No. 69
6	Jl Cipinang Jaya LL No B1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	6	337	No. 3567643 Hak Pakai No.67
7	Jl Cipinang Jaya LL No B2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	7	266	No.3567720 Hak Pakai No. 103
8	Jl Cipinang Jaya LL No C2 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	8	266	No. 3567648 Hak Pakai No. 105

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
9	Jl Cipinang Jaya LL No C3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	9	266	No. 3567723 Hak Pakai No. 109
10	Jl Cipinang Jaya LL No C6 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	10	377	No. 3567637 Hak Pakai No. 114
11	Jl Cipinang Jaya LL No B3 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	11	266	No. 3567645 Hak Pakai No. 111
12	Jl Cipinang Jaya LL No C1 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	12	264	No. 35677222 Hak Pakai No. 108
13	Jl Cipinang Jaya LL No C4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	13	263	No. 3567721 Hak Pakai No. 107
14	Jl Cipinang Jaya LL No B5 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	14	266	No. 3567644 Hak Pakai No. 113
15	Jl Cipinang Jaya LL No B4 Rt. 01 Rw 08 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	15	266	No. 3567646 Hak Pakai No. 113
16	Jl. Ampera Raya Gang Sulastris No C1- C12, B1-B2 Rt 05 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	16	4.724	No 3599029 Hak Pakai No. 10
17	Jl. Ampera Raya Gang Rini No C1- C12 Rt. 06 Rw.02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta	17	3.108	No. 3598691 Hak Pakai No. 16
18	Jl. Flamboyan II & IV Kel. Sunter Mas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	18	9.240	No. 6809219 Hak Pakai No. 41
19	Jl. Antariksa III No. C8 Kel. Cipinang Besar Selatan	20	152	No. 3567717 Hak Pakai No 59
20	Jl. Swakarsa 4 Rt 03 Rw 02 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	22	813	No. 852582 Hak Pakai No 524
21	Jl. Ampera raya Gang Kancil No C1- C7	23	4.075	No 3560575 Hak Pakai No. 12
22	Jl. Cipinang Jaya LL No C7, Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	24	270	No. 3567647 Hak Pakai No 110
23	Jl. Agung Tengah 1 dan 4 Kel. Sunter Agung, Kec Tanjung priok	25	10.138	No. 6869348 Hak Pakai No. 41
24	Jl. Agung Tengah 1 No. C1-C3 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta	26	550	No. 7005392 Hak Pakai No. 53

No	Lokasi Tanah	NUP	Luas Tanah (m ²)	Nomor Sertifikat Tanah
25	Jl. Ampera Raya Terusan I Gang Polri Rt 03 Rw 02 Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	27	1675	No 558794 Hak Pakai No. 59
Total			39.379	

Tabel 4. 3. Tanah

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Golongan/Type	Jumlah
1.	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit
2.	4.01.02.01.004	Rumah Negara Golongan I Type B Permanen	4 unit
3.	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Type C Permanen	46 unit
4.	4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	5 unit
5.	4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Type C Permanen	16 unit
6.	4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Type D Permanen	14 unit
Jumlah Gedung dan Bangunan			86 unit

Tabel 4. 4. Gedung dan Bangunan

3. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Dinas Operasional yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Honda WF 125 SF	1	2006	B.6122.SQA	Baik
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2	2006	B.6121.SQA	Rusak
3.	Honda Mega Pro GL 160 D	4	2006	B.6124.SQA	Baik
4.	Honda Mega Pro GL 160 D	5	2006	B.6125.SQA	Rusak
5.	Honda Mega Pro GL 160 D	6	2006	B.6126.SQA	Baik
6.	Honda Mega Pro GLP III	7	2005	B.6237.SRQ	Baik
7.	Honda Mega Pro GLP III	8	2005	B.6238.SRQ	Rusak
8.	Honda Mega Pro GLP III	9	2005	B.6239.SRQ	Baik

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
9.	Honda Mega Pro GLP III	10	2005	B.6240.SRQ	Rusak
10.	Honda NF 125 TRF	16	2008	B.6562.SQO	Baik
11.	Honda NF 125 TRF	17	2008	B.6567.SQO	Baik
12.	Honda NF 125 TRF	18	2008	B.6565.SQO	Baik
13.	Honda NF 125 TRF	19	2008	B.6566.SQO	Baik
14.	Honda NF 125 TRF	20	2008	B.6563.SQO	Baik
15.	Honda NF 125 TRF	21	2008	B.6564.SQO	Baik
16.	Honda Mega	22	2003	B.6306.PCQ	Rusak
17.	Honda Mega Pro GLP III	26	2005	B.6952.PCQ	Baik
18.	Honda Mega Pro GLP III	24	2005	B.6954.PCQ	Rusak
19.	Honda Mega Pro GLP III	25	2005	B.6953.PCQ	Rusak
20.	Honda Supra X 125	26	2015	B.6867.PYG	Baik
21.	Honda Supra X 125	27	2015	B.6868.PYQ	Baik

Tabel 4. 5. Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

b. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Toyota Kijang Innova G M/T	1	2006	B.1127.FQ	Baik
2.	Toyota Avanza E M/T	2	2006	B.1354.FQ	Baik
3.	Toyota Avanza E M/T	4	2006	B.1343.FQ	Baik
4.	Toyota Avanza E M/T	7	2006	B.8167.WU	Baik
5.	Toyota Avanza G M/T	8	2006	B.8170.WU	Baik
6.	Toyota Avanza E M/T	14	2007	B.2560.UQ	Baik
7.	Toyota Avanza E M/T	15	2007	B. 2647.UQ	Baik
8.	Toyota Avanza G M/T	17	2007	B. 2655.UQ	Baik
9.	Toyota Rush S 1.5 A/T	19	2014	B. 1359.PQR	Baik
10.	Toyota Kijang Innova G A/T	20	2015	B.1733.PQR	Baik

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
11.	Mitsubishi Colt Diesel FE 71 BC	21	2015	B.7434.PPA	Baik
12.	Toyota Kijang Innova V A/T	22	2011	B.1337.PX	Rusak

Tabel 4. 6. Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

c. Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (enam):

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Kondisi
1.	Hyundai	6	2009	B.7524.IO	Baik
2.	Mitsubishi	7	2007	B.7223.IO	Baik
3.	Hyundai	8	2009	B.7518.IO	Baik
4.	Toyota Dyna 130 XT	9	2013	B.7197.PPA	Baik
5.	Toyota Dyna 130 XT	10	2013	B.7198.PPA	Baik

Tabel 4. 7. Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam

4. Peralatan dan Mesin (Perkantoran)

Peralatan dan Mesin yang dikelola dan tercatat dalam Laporan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket.
1.	Personal Komputer (PC)	168 Unit	
2.	Notebook/Laptop	112 Unit	
3.	Printer	188 Unit	
4.	Proyektor LCD/Infokus	16 Unit	
5.	Tablet PC	4 Unit	
6.	Mesin Absensi	6 Unit	
7.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	62 Unit	
8.	External Portable Hardisk	44 Unit	
9.	Server	12 Unit	
10.	Rak Server	5 Unit	
11.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	9 Unit	
12.	Kamera Electronics	12 Unit	
13.	Handy Cam	7 Unit	
14.	Filling Kabinet Besi	142 Unit	
15.	Lemari Besi	292 Unit	
16.	Rak Besi	136 Unit	

No	Jenis Peralatan dan Mesin	Jumlah	Ket.
17.	Workstation	49 Unit	
18.	Kursi Besi/Metal	684 Unit	
19.	Brandkas	8 Unit	

Tabel 4. 8. Peralatan dan Mesin

Melakukan Tranfer Keluar Aset/Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) yang terdiri dari :

No	Merk/Tipe	NUP	Tahun Perolehan	No Polisi	Di transfer Ke
1.	Toyota Avaza E M/T	5	2006	B.1358.FQ	PN Cikarang
2.	Toyota Avaza E M/T	6	2006	B.8168.WU	PN Lubuk Linggau
3.	Toyota Avaza G M/T	12	2006	B.8169.WU	PT Bandung
4.	Toyota Avaza E M/T	16	2007	B.2663.UQ	PN Surakarta

Tabel 4. 9. Tranfer Keluar Aset/Barang BMN

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja. Oleh karena itu Peningkatan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung terus dilakukan Tahun Anggaran 2022 antara lain dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang meliputi:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaaan Belanja Modal	Volume
1.	PC Unit	8 Unit
2.	Laptop	7 Unit
3.	Printer	8 Unit
4.	Scanner	4 Unit
5.	Switch Hub	4 Unit
6.	Microtik	6 Unit
7.	Wireless Access Point	6 Unit
8.	Lemari Besi	4 Unit
9.	Coffe Maker	1 Unit

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Modal	Volume
10.	Televisi	2 Unit
11.	AC Split	2 Unit
12.	Logo MA dan Logo WBK	3 Unit
13.	Dispenser	5 Unit

Tabel 4. 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Belanja Moda

b. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah
1.	Renovasi Rumah Negara Jl. Ampera Raya Gg. Sulastris No C2	1 Unit
2.	Renovasi Rumah Negara Jl. Ampera Raya Gg. Rini No C12	1 Unit
3.	Renovasi Rumah Negara Jl. Agung Tengah II No C26	1 Unit

Tabel 4. 11. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

6. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

a. Pengadaan Kebutuhan/Keperluan Perkantoran (Belanja Barang)

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
1	Keperluan Pokok Pegawai (Air Minum, Majalah/Koran, dll)	12 Bulan
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	3 Paket
3	Bahan Penggandaan (Kertas/Toner)	3 Paket
4	Map dan Amplop	1 Paket
5	Pencetakan dan Pengadaan Blanko/Formulir/Kop Surat/Program Kerja dan keperluan kantor lainnya	2 Paket
6	Pengadaan Kalender Dinding Ditjen Badilum	3500 Unit
7	Pengadaan Kalender Meja Ditjen Badilum	3500 Unit
8	Pengadaan ID card Pegawai dan Name Tag Pegawai	1 Paket
9	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Pegawai	1 Paket
10	Pengadaan Pakaian batik Seragam	1 Paket
11	Pengadaan PIN WBK	1 Paket
12	Pengadaan Laken Hijau	1 Paket
13	Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy	12 Bulan
14	Pengadaan Sewa Tanaman Dalam Pot	12 Bulan
15	Pengadaan Pewangi Ruangan dan Pemeliharaan	12 Bulan
16	Pengadaan Sewa Dispenser	12 Bulan

No	Uraian Pekerjaan/Pengadaan Belanja Barang	Volume
17	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan
18	Pengadaan Provider Internet	12 Bulan
19	Pengadaan Provider Internet Server/Backup	12 Bulan

Tabel 4. 12. Pengadaan Kebutuhan Perkantoran (Belanja Barang)

b. Pengelolaan Sarana Kerja Pengadilan yang meliputi :

- Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Negeri dan Buku Jurnal Keuangan PHI sebanyak 2.662 buku
- Buku Jurnal Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi, Buku Induk Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi dan Buku Penerimaan Hak-hak kepaniteraan 452 buku
- Buku jurnal keuangan perkara PN 3.827 buku
- Buku SKUM/Kwitansi PN 873 buku
- Buku Eksekusi dan buku penerimaan Hak-hak kepaniteraan PN 1.892 buku
- Buku Induk Keuangan perkara 960 buku
- Buku kas bantu PT dan PN 888 buku
- Register Tipikor dan Register Niaga sebanyak 1.075 register
- Register Pidana sebanyak 13.454 register
- Register Perkara Pidana Anak sebanyak 3.619 register
- Register Perdata sebanyak 5.558 register
- Register PHI dan register Keuangan PHI 855 register
- Toga Hakim PT dan PN sebanyak 1.500 stel
- Jas Panitera sebanyak 200 Stel
- Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebanyak 425 buah
- Bendera Mahkamah Agung Sebanyak 360 buah
- Kalung Jabatan Hakim sebanyak 60 buah
- Palu hakim 480 buah

7. Persuratan

Adapun klasifikasi surat tersebut adalah:

- a. Penerimaan surat masuk dari Januari sampai Desember tahun 2022 sebanyak 15.130 (Lima Belas ribu seratus tiga puluh) surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Surat Diterima	
1	Januari	1,266	Surat
2	Februari	1,023	Surat
3	Maret	1,361	Surat
4	April	988	Surat
5	Mei	806	Surat
6	Juni	1,175	Surat
7	Juli	1,388	Surat
8	Agustus	944	Surat
9	September	1,118	Surat
10	Oktober	1,324	Surat
11	November	1,583	Surat
12	Desember	2,154	Surat
Jumlah		15,130	Surat

Tabel 4. 13. Surat Masuk

- b. Pengiriman Surat Keluar dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum periode bulan Januari sampai dengan Desember 2022 yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia maupun oleh Staf Sub Bagian Tata Usaha Bagian Umum sebanyak 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) surat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Surat Terkirim	
1	Januari	399	Surat
2	Februari	131	Surat
3	Maret	234	Surat
4	April	198	Surat
5	Mei	208	Surat
6	Juni	560	Surat
7	Juli	364	Surat
8	Agustus	275	Surat
9	September	257	Surat
10	Oktober	494	Surat
11	November	272	Surat
12	Desember	158	Surat
Jumlah		3,550	Surat

Tabel 4. 14. Surat Keluar

- c. Jumlah Penomoran surat yang dikeluarkan sebanyak 9.170 (Sembilan ribu tujuh puluh) nomor surat dengan rincian sebagai berikut:

No	Penomoran	Dirjen Badilum	Sekretariat	Direktorat Bingganis	Direktorat Papu
1	Surat Biasa	1,499	1,373	1,240	428
2	Surat Keputusan	2,497	132	38	18
3	Surat Edaran	2	-	-	-
4	Memorandum	252	-	-	-
5	SK Pengadaan Barang/Jasa	-	891	416	105
6	Surat Pengadaan Barang/Jasa	-	148	104	27
Jumlah		9,170			

Tabel 4. 15. Penomoran Surat

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Aplikasi e-Court dan e-Litigasi

Sesuai tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi maka Mahkamah Agung melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi e-Court yang antara lain disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ke seluruh pengadilan. Aplikasi e-court yang semua hanya mengakomodir proses e-filing dan e-payment, saat ini sudah dilengkapi dengan fitur yang dapat mengakomodir proses persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Dimana pada proses e-litigasi ini para pihak yang berperkara dapat melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik kesimpulan dan atau jawaban yang dapat diakses secara elektronik

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan e-Raterang

Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dengan penambahan aplikasi E-raterang (aplikasi surat keterangan elektronik) merupakan salah satu wujud dalam mendukung layanan pada Pengadilan. Aplikasi E-raterang merupakan aplikasi yang mendukung pelayanan peradilan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan, seperti surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik, surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Untuk meningkatkan pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terhadap masyarakat pencari keadilan di tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan 2 kategori yaitu kategori favorit dan kategori terbaik. Beberapa ketentuan pengusulan

- a. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - b. Pengadilan Negeri untuk diikuti sertakan lomba oleh pengadilan Tinggi dibagi berdasarkan kelas.
 - c. PTSP pada pengadilan tinggi secara otomatis akan dinilai oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
3. Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU)
- Aplikasi SIPAPU adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu pengawasan atau monitoring kinerja satker oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi, aplikasi ini sangat bermanfaat diatas pandemic ini. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum masih dapat mengawasi kinerja satker tanpa harus datang langsung ke pengadilan.
4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2019 mengamanatkan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas adalah mendorong keterpaduan sistem peradilan pidana yang diimplementasikan melalui pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Secara garis besar SPPT TI ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara pidana khususnya dalam hal pertukaran data dan informasi antara institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. SPPT-TI dimulai pada tahun 2016 dengan Nota Kesepahaman Nomor 1/NK/MA/1/2016 antara Mahkamah Agung dengan Kemenko Polhukam, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Sandi Negara, ditandatangani tanggal 28 Januari tahun 2016 yang berlaku selama 5 Tahun sejak Nota Kesepahaman ditandatangani dan berakhir pada tanggal 26 Desember

2022. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Unit Eselon I yang membawahi Peradilan Umum berperan dalam memastikan dokumen elektronik yang diinput oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah sesuai, lengkap, berdasarkan kinerja dan tepat waktu sehingga dokumen dapat dipertanggungjawabkan. Kepatuhan pengadilan dalam menginput data SPPT-TI termonitor pada tahun 2021 tercatat sebanyak 205 dari 210 pengadilan dan pada tahun 2022 termonitor sudah mencapai 210 pengadilan (sesuai dengan target). Untuk data yang dipertukarkan mengalami penambahan dari awalnya 5 (lima) jenis data ditahun 2022 bertambah menjadi 16 (enam belas) jenis data.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mulai dibentuk pada tahun 2015, awal mula APM dilakukan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Setelah percobaan di kedua Pengadilan tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mulai mensosialisasikan ke seluruh Pengadilan di Indonesia. Akreditasi Penjaminan Mutu mempunyai kriteria penilaian yaitu :

- 1) Kepemimpinan (*Leadership*)
- 2) Perencanaan Strategis (*strategic Planing*)
- 3) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
- 4) Sistem Dokumen (*Document System*)
- 5) Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
- 6) Manajemen Proses (*Prosess Management*)
- 7) Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Berkembangnya APM semula APM hanya diterapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada satuan kerja Pengadilan dibawahnya, namun pimpinan Mahkamah Agung melihat manfaat dan perubahan yang terjadi di Peradilan Umum, setelah APM maka pimpinan MA mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan memberlakukan APM untuk 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan APM menjadi program nasional.

Untuk memudahkan pelaksanaan APM di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan surat nomor 291/DJU/OT.01.3/3/2017 perihal audit assesmen akreditasi dalam rangka efesiensi dan efektifitas pelaksanaan audit/asesssmen akreditasi terhadap pengadilan negeri seluruh Indonesia, maka diberikan mandat ke Pengadilan Tinggi yang telah mendapatkan Akreditasi A untuk melaksanakan audit/asesmen akreditasi ke Pengadilan Negeri di wilayahnya, hasil Surveillance Akreditasi tahun 2022 sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah	Predikat			Disclaimer	Predikat Ditangguhkan
			A	B	C		
1	Pengadilan Tinggi	30	30	0	0	0	0
2	Pengadilan Negeri Klas IA Khusus	15	12	3	0	0	0
3	Pengadilan Negeri Klas IA	53	51	1	0	0	1
4	Pengadilan Negeri Klas IB	114	113	0	0	0	1
5	Pengadilan Negeri Klas II	200	200	0	0	0	0
Total		412					

Tabel 5. 1. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta terjangkau perlu adanya perubahan sistem pelayanan, perubahan sistem pelayanan tersebut seperti pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku. Dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mensosialisasikan dan menetapkan pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2018.

Prosedur pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengambil nomor antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah disediakan;

- b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan;
- c. Petugas PTSP mencatat menverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *back-office* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pada Surat Keputusan Direktur tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga mengatur Meja Pelayanan, seperti:

- 1. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ditempatkan pada *lobby* yang menghadap pintu masuk, namun jika tidak memungkinkan agar disesuaikan dengan kondisi ruang Pengadilan, yang dilengkapi kursi-kursi untuk pemohon;
- 2. Bentuk dan ukuran meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memudahkan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas;
- 3. Di atas meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus tersedia computer, buku tamu, formulir pengaduan dan brosur yang berisi tentang layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan;
- 4. Tulisan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dipasang di dinding belakang/*backdrop* Pelayanan Satu Pintu (PTSP)
- 5. Ukuran meja PTSP adalah sebagai berikut :
 - a. Tinggi meja maksimal 75 cm;
 - b. Lebar meja per bagian pelayanan maksimal 60 cm;
 - c. Panjang meja PTSP disesuaikan dengan jumlah layanan Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum yang ada di Pengadilan;
 - d. Setiap Ruangan layanan agar disediakan kursi untuk pengunjung/ pencari informasi PTSP yang mengantri atau menunggu.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sudah meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Seluruh Indonesia, setiap tahunnya di monitoring atau penilaian yang bertujuan untuk konsistensi atau masih dalam standar pada meja pelayanan dan para petugas bekerja meja PTSP, untuk mengoptimalkan kinerja tiap tahun Direktorat Jenderal

Badan Peradilan membuat Lomba pada Pengadilan dengan kriteria-kriteria tertentu, untuk tahun 2022 ini penilaian lomba dinilai melalui virtual atau online dan pengumumannya melalui website. Jumlah Pengadilan yang mengikuti Lomba PTSP Tahun 2022, lomba tersebut mempunyai dua kategori pemenang antarlain kategori terbaik dan terfavorit dengan rincian sebagai berikut, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA, Kelas II masing-masing pengadilan sebanyak 6 pemenang dengan peringkat I sampai 3 sebanyak 3 pemenang dan harapan I sampai 3 sebanyak 3 untuk klas IB mempunyai peringkat 1 - 3 sebanyak 3 pengadilan dan Harapan I sampai III masing-masing sebanyak 2. Untuk kategori terfavorit hanya mempunyai peringkat I sampai Peringkat 3 saja.

C. Inovasi Pelayan Publik

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan dan pelayanan publik serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi, adapun Inovasi yang di buat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat antara lain:

1. Aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi

Aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan pengadilan tinggi untuk menilai tingkat kepatuhan pengisian data pada aplikasi SIPP dan kesiapan pengadilan tinggi dalam mengimplementasikan register elektronik.

2. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi

Aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum diisi secara lengkap dan dapat digunakan sebagai alat monitoring terhadap implementasi SIPP.

3. Aplikasi CAKRA (Capaian Kinerja) Tenaga Teknis

Adalah aplikasi yang merekam capaian kinerja bagi seluruh tenaga teknis dilingkungan peradilan umum

4. BIS (BADILUM INFORMATION SYSTEM)

Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk proses kepegawaian dan pengolahan data tenaga teknis di lingkungan peradilan umum yang inovatif, efektif dan akurat.

Proses kepegawaian meliputi proses promosi dan mutasi pegawai (TPM), data dukung proses kenaikan pangkat, data dukung proses pensiun, pencetakan surat-surat keputusan.

D. Data dan Informasi

Sarana dan Prasarana Disabilitas dalam proses peradilan perlu dilakukan untuk persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana. Pelayanan merupakan tata cara atau prosedur dalam proses peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam penyediaan akomodasi yang layak, ada hal yang ditekankan dalam peraturan pemerintah yaitu, mengenai penilaian personal dan penyediaan pendamping disabilitas dan penerjemah.

Hampir semua pengadilan sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah sesuai standar, tetapi ada beberapa pengadilan yang hanya mempunyai sarana dan prasarana disabilitas tetapi belum sesuai standar.

BAB VI PEMBINAAN

A. Peresmian Gedung Pengadilan



Gambar 6. 1 Peresmian Gedung Pengadilan

Yang

Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H didampingi para pejabat Mahkamah Agung RI termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Pembentukan Pengadilan baru ini sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien dalam mendekatkan pelayanan pada pencari keadilan, dengan hadirnya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ini, maka para pencari keadilan di wilayah Kepulauan Riau seperti Pulau Bintan, Batam, Anambas dan Natuna tidak perlu lagi jauh-jauh ke Pekanbaru untuk mengurus Perkara Banding.

Selain itu Ketua Mahkamah Agung RI juga melakukan peresmian operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding baru dan 38 gedung Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia secara seremonial, diantaranya untuk peradilan umum ada 4 Pengadilan Tinggi dan 20 Gedung Pengadilan Negeri.

Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau serta Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Baru, peresmian dilaksanakan di Kepulauan Riau pada senin, 5 Desember 2022

yang di resmikan oleh Mulia Ketua Mahkamah

B. Peluncuran Aplikasi

Pada hari Senin, 12 Desember 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan penghargaan Peningkatan Kinerja Peradilan kepada Pengadilan se Indonesia, bersamaan dengan itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga meluncurkan Aplikasi yang di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H, Wakil Ketua Bidang Yustial, Wakil Ketua Bidang Non Yustisial dan Juga Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. 4 (empat) aplikasi tersebut yaitu :

1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS PT)
2. Monitoring Implementasi SIPP (MIS PT)
3. Aplikasi Capaian Kinerja Tenaga Teknis (CAKRA)
4. Aplikasi Badilum Informasi System (BIS)



Gambar 6. 2. Peresmian Aplikasi Badilum

C. Kerjasama dengan Daskrimti Kejaksaan

Penyelesaian perkara pradilan cepat, transparan dan biaya ringan merupakan tujuan Mahkamah Agung RI. salah satunya dengan menerapkan e-tilang untuk itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama Pusat Data Statistik Kriminal dan teknologi Informasi (Diskrimti) Kejaksaan Agung RI melaksanakan Sosialisasi e-tilang terpadu secara rutin ke berbagai satuan Kerja di daerah. Sosialisasi ini sesuai dengan Perma No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran lalu lintas dan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI Nomor 03/KMA/IX/2021 tanggal 17 September 2021 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Gambar 6. 3. Kerjasama dengan Daskrimti Kejaksaan

D. Kerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat

Banyaknya tidak kejahatan yang menggunakan teknologi informasi seperti modus penipuan, peretasan dengan *ransomeware* dan transaksi ilegal obat-obatan terlarang yang

sulit untuk di buktikan. Dengan ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan sosialisasi yang bekerjasama dengan kedutaan besar Amerika Serikat dengan pemateri bernama **Scott E. Bradford**, seorang jaksa penuntut federal Amerika Serikat merupakan pakar penindakan kejahatan dan peretasan, yang dihadiri oleh para ketua pengadilan tinggi di Indonesia. Sosialisasi ini memperkenalkan tentang *cryptocurrency* yang marak digunakan untuk transfer dalam transaksi ilegal serta penipuan, *cryptocurrency* adalah pelaku kejahatan siber yang mengaburkan identitas untuk melakukan kejahatan, dengan sosialisasi diharapkan adanya tambahan informasi untuk penanganan pelaku kejahatan siber.



Gambar 6. 4. Kerjasama dengan Kedubes Amerika Serikat

E. Audiensi dengan Jepang

Pada Rabu, 30 November 2022, perwakilan dari *Japan International Cooperation Agency* disingkat dengan JICA mengunjungi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. **Mr Nobukazu Nishio** sebagai tenaga ahli JICA/Hakim dari Jepang dan didampingi dengan **Ms. Yukiko Mazawa** yang mana menjabat sebagai *Project Coordinator* JICA, kedatangan keduanya berkaitan dengan hibah kegiatan Peningkatan Kemampuan hakim dalam penanganan perkara bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Kedatangan Mr. Nishiro yang

merupakan ahli hukum perdata yang sudah 10 tahun memiliki pengalaman menangani perkara perdata (*civil case*) terutama pada bidang hak kekayaan intelektual di Pengadilan Tokyo bertujuan untuk kerjasama antara JICA dan Mahkamah Agung RI. Tujuan kerjasama adalah

a. Meningkatkan

kemampuan hakim terutama dalam hal penanganan HKI, dengan cara training (pelatihan) yang sudah disepakati dengan Mahkamah Agung RI yang direncanakan setiap satu tahun sekali;



Gambar 6. 5. Audiensi dengan Jepang

b. Menyediakan materi *refrensi case book* untuk meningkatkan kemampuan hakim. Buku ini berisi kasus-kasus yang pernah terjadi di jepang berkaitan dengan kasus HKI.

F. Bimbingan Teknis



Gambar 6. 6. Bimtek Tenaga Teknis

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Bimbingan Teknis seperti Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*), Diseminasi Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan, Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan, Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual HKI/Niaga dan Rasionalisasi Tenaga Teknis.

Diadakanya bimbingan teknis untuk hakim dan penitera bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berintegritas, kredibel dan professional. kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengembangan:

No	Kegiatan	Tanggal	Orang	Keterangan
1	FGD Kepaniteraan (Jurusita)	22 s.d 24 Maret 2022	67	
		11 s.d 13 Desember 2022	47	
2	Desminasi Penegak Hukum dalam Penanganan perkara di Pengadilan	23 s.d 25 Mei 2022	57	
3	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	8 s.d 10 Maret 2022	110	
		7 s.d 9 Juni 2022	75	
		18 s.d 20 Juli 2022	131	
		9 s.d 11 Agustus 2022	109	
4	Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan	12 s.d 14 September 2022	68	
5	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual HKI/Niaga	13 s.d 15 Oktober 2022	64	
6	Rasionalisasi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	31 Oktober 2022	36	
7	Evaluasi Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif	8 s.d 9 November 2022	12	
8	Evaluasi FGD Kepaniteraan	21 Desember 2022	25	
Total			801	

Tabel 6. 1 Kegiatan Bimtek Tenaga Teknis

BAB VII PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam rangka mendapatkan pelayanan public yang mudah, transparan dan dengan biaya yang ringan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai pembinaan terhadap satuan kerja (unit pelaksana teknis) dibawahnya dan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengawasan terhadap jam kerja dari mulai jam masuk hingga jam pulang kantor oleh seluruh pimpinan secara berjenjang;
- b. Mengadakan Pembinaan berupa Peningkatan Disiplin berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/SK/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang peningkatan Kinerja baik terhadap pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun panitera serta pegawai;
- c. Memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) berupa promosi atau mutasi terhadap tenaga teknis hakim maupun panitera serta pegawai
- d. Melaksanakan *surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dan Pembinaan Teknis Asesor;
- e. Memonitoring ke Pengadilan yang menerima anggaran pos Batuan hukum, sidang diluar gedung pengadilan serta pembebasan biaya perkara, mengenai pelaksanaan dan penyerapan anggaran tersebut;
- f. Melaksanakan pembinaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja dilingkungan peradilan umum;
- g. Menindaklanjuti surat-surat pengaduan dari Pengadilan Tinggi untuk dilanjutkan ke Badan Pengawasan MA.RI
- h. Memonitoring pengadilan tentang PTSP, layanan hukum Prodeo, pelaksanaan layanan posbakum, sidang diluar gedung pengadilan, pelaksanaan elitigasi Pengadilan Negeri, pelaksanaan E-litigasi Hakim, Keterbukaan Informasi Publik,

Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara, role model, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) dan penerapan Aplikasi Pelayanan Publik dengan cara memberikan penghargaan lewat lomba.

B. EVALUASI

- a. Mengevaluasi data-data yang masuk dari pengadilan-pengadilan yang telah di monitoring yaitu administrasi peradilan umum dan kebutuhan sarana kerja pengadilan;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran posbakum, sidang di luar Gedung Pengadilan serta pembebasan biaya perkara;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan DIPA 03 dalam rangka peningkatan daya serap anggaran di seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan umum melalui pemangilan terhadap satker yang daya serapnya masih rendah;
- d. Pengadaan lomba kegiatan Ditjen Badilum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dilakukan setiap tahunnya.

BAB VIII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya meningkatkan pelayanan peradilan dalam mencapai visinya “Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung” melalui program dan inovasi dibidang informasi teknologi yang dapat menghadirkan peradilan yang modern, mudah diakses, biaya ringan dan berkeadilan serta dapat melayani masyarakat pencari keadilan. Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mencapai keberhasilan antara lain:

- a. Penerapan saran dan prasarana untuk disabilitas 100%.
- b. Meluncurkan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP PT, Monitoring Implementasi SIPP PT, Cakra (Capaian Kinerja) Tenaga Teknis dan BIS (Badilum Information System).
- c. Penyerahan Sertifikat akreditasi kepada 52 Pengadilan, dan pemberian penghargaan lomba PTSP kepada 33 Pengadilan;
- d. Melakukan Pembinaan secara berkala pada pengadilan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 dan 8 Tahun 2016;

Daya serap anggaran Tahun 2021 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu sebesar 99,23%, daya serap anggaran pada satker daerah sebesar 98,09%.

B. REKOMENDASI

Sebagai lanjutan capaian akreditasi yang sudah mencakup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 akan melaksanakan:

- a. Mengadakan penghargaan lomba PTSP dan program ditjen badilum lainnya setiap tahunnya;
- b. Mempersiapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019

tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum, target Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 75% dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;

- c. Memulai penerapan aplikasi Evaluasi Implementasi SIPP PT, Monitoring Implementasi SIPP PT, Cakra (Capaian Kinerja) Tenaga Teknis dan BIS (Badilum Information System).



SURAT KEPUTASAN
TIM LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Tahun 2022



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN LAPORAN KINERJA
TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2022 perlu membentuk Tim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan
Kinerja Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan bertugas menyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan dan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan mengumpulkan data
dan analisis yang dibutuhkan serta menyusun target rencana kinerja tahun
2024 berdasarkan TOR dan RAB yang telah disusun oleh masing-masing
unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 8 November 2022

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Arsip.

Lampiran I
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022
Tanggal : 8 November 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

1. Data dan Narasi :
tentang
A. Pendahuluan
B. Kebijakan Umum
C. Visi dan Misi
D. Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
E. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

Koordinator : Drs. Wahyudin, M.Si
Anggota : 1. Roslina Napitupulu, SH., MH
2. Kurnia Ary Soelaksono, SH., M.Hum
3. Sukatno, SH
4. Krisna Sofiadi, SH
5. Fardi Faisal SE
6. Edwin Ruliawan, SH., MH
7. Nopinus Andreas Purba, SE
8. Puji Mulyani, S.E
9. Indra Kurniawan, SE., MM
10. Suwarni, SH
11. Arif Hidayat, S.Kom
12. Ivonne Sari Indah, S.Si
13. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
14. Norcha Satria Adi N, S.H
15. Frisca Viradiba, S.Psi
16. Indah Palupi Cipto Murti, S.Psi

2. Data dan Narasi :
tentang
A. Sumber Daya Manusia Tenaga Teknis Peradilan Umum
B. Pengawasan Internal dan Evaluasi

Koordinator : Lucas Prakoso, SH., M.Hum
Anggota : 1. Herti Setiawati, RR., SE., M.Hum
2. Junaedi Kamaludin, SE., M.Si
3. Romi Permana, SH., MH
4. Saenal Akbar, S.H., M.H
5. Septin Sri Noni, SE
6. Ade Supriatna, SH., MH
7. Ade Soniawati, SH., MH

3. Data dan Narasi :
tentang
1. Keadaan Perkara
2. Regulasi Tahun 2022

Koordinator : Zahlisha Vitalita, SH
Anggota : 1. Lies Khadjjah, SH., MH
2. Candra, SH
3. Budi Setioko, S.H., M.H
4. Achmad Basyari, SE
5. Aris Priyanto, ST
6. Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom
7. Oktaviandi Wahyu Nugroho, S.T
8. Dodon Angin Wiyono, S.Kom

Lampiran II
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 2451/DJU/SK/OT01.3/11/2022
Tanggal : 8 November 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

I. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun
- b. Jumlah Tenaga Teknis yang Mengikuti Pembinaan

2. Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator kinerja:

Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

Koordinator : Lucas Prakoso, SH., M.Hum

- Anggota :
1. Herti Setiawati, SH., MM
 2. Saenal Akbar, S.H., M.H
 3. Krisna Sofiadi, SH
 4. Suwarni, SH
 5. Fardi Faisal, SE
 6. Aris Priyanto, ST
 7. Arif Hidayat, S.Kom
 8. Ivonne Sari Indah, S.Si
 9. Riswan Haryo Yudianto, S.Kom
 10. Norcha Satria Adi Nugroho, S.H
 11. Indah Palupi Cipto Murti, S.Psi

II. PENGUKURAN DAN ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator kinerja:

- a. Jumlah Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum
- b. Presentase Layanan yang diberikan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
- c. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
- d. Presentase Perkara peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- e. Presentase Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tepat Waktu

Koordinator : Zahlisa Vitalita, SH.,M.H

- Anggota :
1. Roslina Napitupulu, SH., MH
 2. Kurnia Arry Soelaksono, SE., SH., M.Hum
 3. Sukatno, SH
 4. Lies Khadijah, SH., MH
 5. Candra, SH
 6. Budi Setioko, S.H., M.H
 7. Edwin Ruliawan, SH., MH
 8. Nopinus Andreas Purba, SE
 9. Frisca Viradiba, S.Psi

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM


H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H

